

**NOVEL LAUT BERCERITA SEBAGAI KRITIK TERHADAP
GAYA KEPEMIMPINAN OTORITER ORDE BARU**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ULYA MUSTANIRAH

NIM. 220801014

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2026 M/1447

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulya Mustanirah
NIM : 220801014
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir: Sigli, 6 Juni 2004
Alamat : Desa Bale Rastong

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2026

Yang menyatakan,



Ulya Mustanirah
NIM. 220801014

**NOVEL LAUT BERCERITA SEBAGAI KRITIK TERHADAP GAYA
KEPEMIMPINAN OTORITER ORDE BARU**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Ulya Mustanirah

NIM. 220801014

Mahasiswa program studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري
Pembimbing

A R - R A N I R Y


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.

NIP. 198103162011011003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
NOVEL LAUT BERCEKITA SEBAGAI KRITIK TERHADAP GAYA
KEPEMIMPINAN OTORITER ORDE BARU

Ulya Mustanirah
NIM. 220801014

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 Agustus 2026

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Reza Idris, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

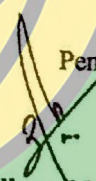
Sekretaris,


Shafiyur Rahman, S.A.P

Penguji I,


Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Penguji II,


Aklima, M.A.
NIP. 198810062019032009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Muli Atalia, M.Ag.
NIP. 197408121999031005

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi kepemimpinan otoriter negara pada masa Orde Baru dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori serta menjelaskan cara negara menjalankan kekuasaan terhadap kelompok oposisi politik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan semiotika Roland Barthes dan teori rezim otoriter Juan J. Linz. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan novel *Laut Bercerita* sebagai sumber data primer, didukung oleh berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel merepresentasikan kepemimpinan otoriter melalui empat karakteristik utama, yaitu pluralisme politik yang terbatas, tidak adanya ideologi elaboratif, tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif, dan kepemimpinan tanpa akuntabilitas yang luas. Selain itu, negara menjalankan kekuasaannya melalui pengawasan, intimidasi, infiltrasi, pembatasan informasi, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan paksa terhadap kelompok oposisi. Temuan ini menegaskan bahwa novel *Laut Bercerita* merupakan kritik terhadap praktik kepemimpinan otoriter Orde Baru yang mengutamakan stabilitas politik dengan mengorbankan kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat.

Kata Kunci: Kepemimpinan Otoriter, Orde Baru, *Laut Bercerita*, Semiotika Roland Barthes, Juan J. Linz.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Novel Laut Bercerita Sebagai Kritik Terhadap Gaya Kepemimpinan Otoriter Orde Baru”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti sendiri sebagai bentuk refleksi ilmiah, dan secara umum bagi pengembangan ilmu politik, khususnya kajian mengenai kepemimpinan, kekuasaan, dan demokrasi di Indonesia. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam, kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ramzi Murziqin, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, Arif Akbar, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik, dan Mumtazinur S.I.P., M.A. sebagai Penasehat Akademik (PA).
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada selaku pembimbing Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D. yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penelitian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, panutanku Ayahanda tercinta Muhammad Taufiq dan pintu surgaku Ibunda tercinta Cut Khadijah terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan kasih sayang, semangat serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana dan mendapatkan gelar S.I.P. Serta yang terkasih adik-adik penulis yang telah mendoakan, memberikan perhatian serta dukungan tiada henti kepada penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat tercinta Recordsixdara: Istiqamah, Nazira Husna, Izni Fazira, Afifatul Ulya, dan Rilfa Mafianti, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persahabatan, kebersamaan, doa, dukungan, serta semangat yang tidak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatkan dalam setiap kesulitan, dan selalu hadir memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga, dipenuhi keberkahan, dan masing-masing dari kita senantiasa diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita serta kesuksesan di masa depan.
7. Kepada sahabatku Amy Ruhaimi, Intan Wulandari, Suci Amara, Diah Rozatun Shalsabil penulis mengucapkan terima kasih karena selalu hadir dalam setiap suka maupun duka, menjadi tempat berbagi cerita, serta terus memberikan semangat ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Terima kasih telah bersedia meminjamkan laptop kepada penulis saat laptop penulis mengalami kendala,

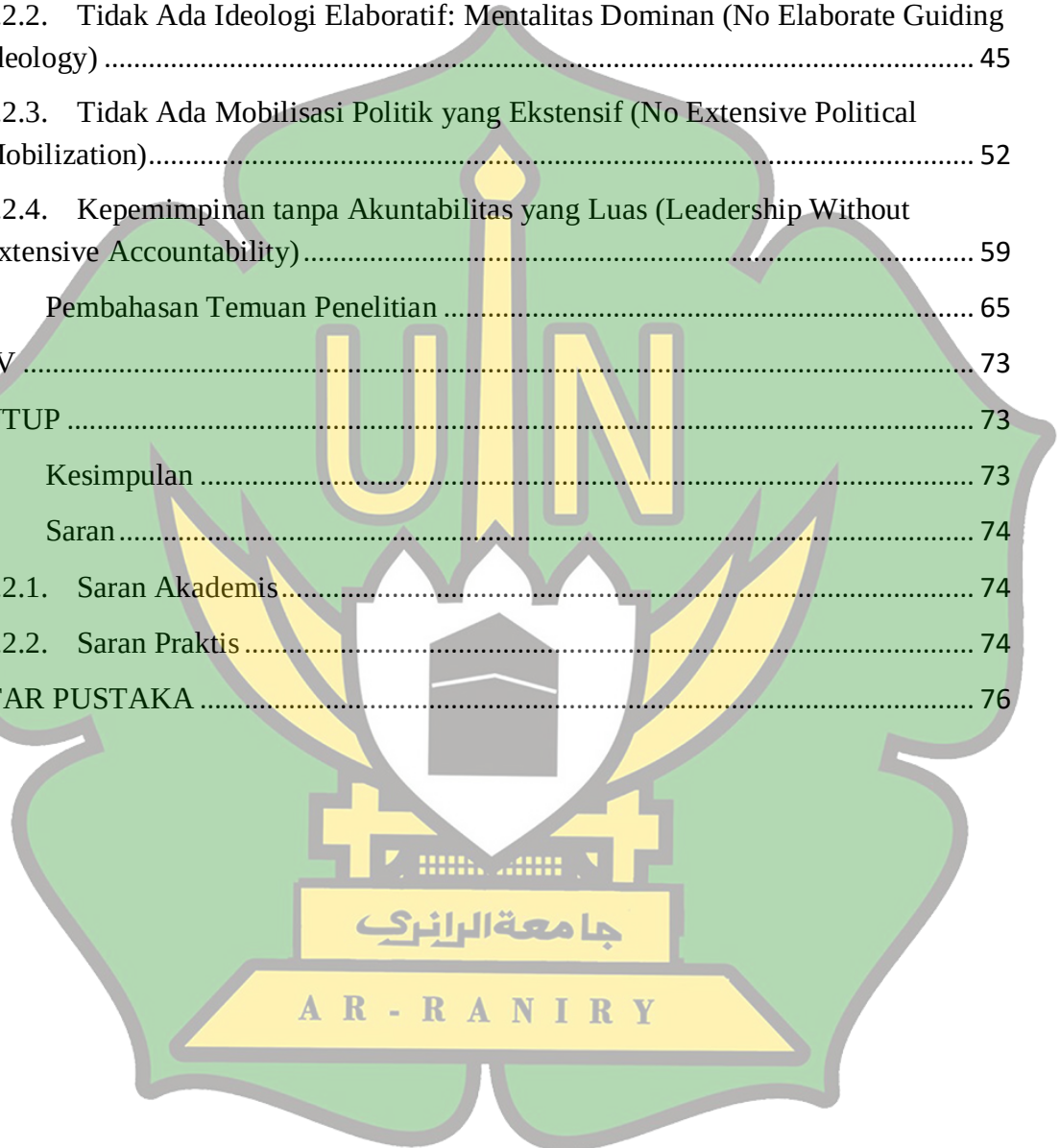
sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terus berjalan. Terima kasih juga karena telah setia menemani, selalu hadir di sisi penulis saat sedang sakit, serta dengan tulus meluangkan waktu untuk mendampingi penulis menjalani pengobatan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan kalian mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

8. Kepada teman-teman angkatan 22 Ilmu Politik, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini. Bersama kalian, perjalanan meraih gelar sarjana terasa lebih berwarna dengan berbagai cerita, tawa, perjuangan, dan kebersamaan yang akan selalu dikenang. Semoga langkah kita setelah ini membawa kesuksesan di jalan masing-masing, tanpa melupakan tempat di mana kita pernah tumbuh dan berjuang bersama.
9. Kepada pemilik NIM 220802034 terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kesabaran dalam menjelaskan setiap hal yang belum penulis pahami, serta atas apresiasi dan perayaan kecil yang selalu diberikan pada setiap pencapaian penulis. Terima kasih karena selalu mengulurkan tangan ketika penulis menghadapi masa-masa sulit, serta senantiasa mendoakan kesehatan dan keselamatan penulis. Kehadiran dan ketulusanmu telah menjadi salah satu alasan perjalanan ini terasa lebih ringan dan berarti.
10. *Last but not least*, diri saya sendiri, Ulya Mustanirah, atas komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah tetap melangkah meskipun dalam keadaan sakit, tetap memilih maju meski dihantui rasa takut, dan tetap berjuang di balik tangis yang hampir setiap malam menjadi teman. Tidak semua perjuangan terlihat oleh orang lain, tetapi setiap luka, air mata, dan doa yang dipanjatkan telah menjadi saksi perjalanan ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah. Semoga setiap langkah dan perjuangan yang telah dilalui dibalas Allah Swt. dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan yang tiada putus.

DAFTAR ISI

Abstrak	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Landasan Teori	15
2.3. Kerangka Berpikir	22
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
3.1. Lokasi Penelitian	23
3.2. Jenis Penelitian	23
3.3. Teknik Pengumpulan Data	24
3.4. Sumber Data.....	25
3.5. Teknik Analisis Data	26
BAB IV	29
HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	29
4.1.1. Profil Novel Laut Bercerita	30
4.1.2. Biografi Singkat Leila S.Chudori	32
4.1.3. Sinopsis Novel Laut Bercerita	33

4.1.4. Konteks Politik Orde Baru.....	34
4.2. Representasi Kepemimpinan Negara dalam Novel Laut Bercerita	35
4.2.1. Pluralisme Politik yang Terbatas (Limited Political Pluralism).....	39
4.2.2. Tidak Ada Ideologi Elaboratif: Mentalitas Dominan (No Elaborate Guiding Ideology)	45
4.2.3. Tidak Ada Mobilisasi Politik yang Ekstensif (No Extensive Political Mobilization).....	52
4.2.4. Kepemimpinan tanpa Akuntabilitas yang Luas (Leadership Without Extensive Accountability)	59
4.3. Pembahasan Temuan Penelitian	65
BAB V	73
PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
5.2.1. Saran Akademis.....	74
5.2.2. Saran Praktis	74
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang telah mengalami perubahan besar sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi membawa perubahan dalam sistem politik melalui penguatan demokrasi, kebebasan pers, pluralisme politik, serta mekanisme pergantian kekuasaan secara lebih terbuka. Namun, perubahan tersebut tidak berarti bahwa persoalan mengenai konsentrasi kekuasaan, kebebasan sipil, dan hubungan antara negara dengan kelompok kritis telah sepenuhnya berakhir. Dalam perkembangan politik Indonesia saat ini, persoalan mengenai kualitas demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta ruang masyarakat sipil masih menjadi perhatian. Freedom House dalam laporan *Freedom in the World 2026* tetap mencatat bahwa Indonesia memiliki pluralisme politik dan media serta beberapa kali pergantian kekuasaan secara damai, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi sistemik, konflik di Papua, diskriminasi, serta penggunaan hukum pencemaran nama baik dan penistaan agama yang dipolitisasi.¹

Persoalan mengenai kebebasan dalam menyampaikan kritik juga masih menjadi bagian dari dinamika politik Indonesia kontemporer. Laporan Freedom House mengenai

¹ Freedom House, "Indonesia: Freedom in the World 2026 Country Report," *Freedom House*, 2026, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2026>

kebebasan internet di Indonesia mencatat bahwa sepanjang periode Juni 2024 sampai Mei 2025, kebebasan internet sedikit mengalami penurunan dan sejumlah pengkritik pemerintah, jurnalis, serta pengguna internet masih menghadapi proses hukum, serangan, maupun intimidasi berkaitan dengan aktivitas mereka di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan politik dan ruang kritik tetap membutuhkan perhatian karena hubungan antara kekuasaan negara dan masyarakat tidak selalu berlangsung tanpa tekanan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan pemilu dan pergantian pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, serta menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, pemahaman terhadap pengalaman politik masa lalu menjadi penting untuk melihat bagaimana suatu kekuasaan dapat berkembang menjadi dominan dan membatasi ruang politik masyarakat. Salah satu periode yang menunjukkan karakter tersebut secara kuat adalah masa Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade, sejak 1966 hingga 1998. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membangun stabilitas politik melalui kontrol yang kuat terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Meskipun periode tersebut ditandai dengan pembangunan ekonomi dan stabilitas pemerintahan, praktik politiknya juga ditandai oleh pembatasan oposisi, pengendalian terhadap pers, pembatasan partisipasi politik, serta penggunaan aparat keamanan dalam mengendalikan kelompok yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. Dalam konteks tersebut, negara menjadi aktor dominan dalam mengatur kehidupan politik dan sosial masyarakat.

Sejarah politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari periode panjang kekuasaan Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade, sejak 1966 hingga 1998. Masa ini ditandai oleh stabilitas politik yang dibangun melalui kontrol ketat terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga negara, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Meskipun rezim Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, keberhasilannya itu dibangun di atas fondasi otoritarianisme, represi terhadap oposisi politik, pembatasan kebebasan pers, dan pengendalian ketat terhadap ruang publik. Dalam konteks tersebut, negara menjadi aktor dominan yang mengatur seluruh aspek kehidupan politik dan sosial, dengan militer sebagai instrumen utama pelaksanaan kekuasaan.²

Kepemimpinan Orde Baru menampilkan karakteristik yang sangat hierarkis dan sentralistik. Kekuasaan dipusatkan pada figur presiden, sementara partisipasi masyarakat dibatasi melalui sistem politik yang dikontrol secara ketat. Konsep “Demokrasi Pancasila” dijadikan legitimasi formal untuk membungkus praktik politik yang pada kenyataannya bersifat monolitik. Partai politik disederhanakan menjadi tiga, dan lembaga legislatif berfungsi lebih sebagai alat legitimasi daripada sebagai lembaga pengawas kekuasaan eksekutif. Dalam konteks politik seperti ini, oposisi politik praktis tidak memiliki ruang untuk berkembang. Kelompok mahasiswa, aktivis, maupun intelektual

² Rajab, “Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi dan Politik, dan Demokrasi Formal Masa Reformasi.” *Jurnal Politik Indonesia* 8, no. 1 (2022): 59–78.

yang mencoba mengkritik kebijakan pemerintah sering kali mengalami intimidasi, penangkapan, bahkan kekerasan fisik dan penghilangan paksa.³

Salah satu ciri utama kepemimpinan otoriter pada masa Orde Baru adalah kemampuan negara untuk mengendalikan kehidupan politik dan membatasi ruang oposisi melalui mekanisme kekuasaan yang terpusat. Dalam sistem kepemimpinan semacam ini, pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan elite penguasa, sementara masyarakat dan kelompok kritis diposisikan sebagai objek kontrol negara. Praktik ini terlihat melalui pengawasan ketat terhadap aktivitas politik, pembungkaman kritik, serta penggunaan aparat keamanan sebagai instrumen untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan. Pola kepemimpinan tersebut menunjukkan bagaimana negara tidak hanya memerintah secara administratif, tetapi juga menggunakan kekuasaan represif untuk memastikan kepatuhan politik dan meniadakan perlawanan.⁴

Novel *Laut Bercerita* dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki tingkat pembaca dan penerimaan publik yang tinggi dibandingkan karya sastra lain yang mengangkat tema serupa. Sejak diterbitkan, novel ini mendapatkan perhatian luas dari pembaca, khususnya di kalangan mahasiswa dan komunitas akademik, serta kerap dijadikan bahan diskusi dalam forum literasi dan kajian sosial-politik. Tingginya minat pembaca tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap praktik kekuasaan dan kepemimpinan otoriter yang disampaikan dalam novel ini mampu menjangkau publik

³ Demokratisasi, “Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi.”

⁴ Nursidik, “Tafsir Indonesia di Rezim Otoritarianisme.”

secara luas. Kelebihan ini menjadikan *Laut Bercerita* relevan untuk dikaji dalam perspektif ilmu politik, karena narasi yang dibangun tidak hanya merepresentasikan pengalaman historis, tetapi juga berfungsi sebagai medium penyampaian kritik politik terhadap praktik kepemimpinan otoriter negara pada masa Orde Baru.

Melalui narasi tentang relasi antara negara dan warga, novel *Laut Bercerita* merepresentasikan bagaimana kekuasaan dijalankan secara terpusat dan represif, terutama melalui peran aparat keamanan dalam mengontrol dan menekan kelompok oposisi. Penggambaran tersebut menunjukkan pola kepemimpinan politik yang menempatkan stabilitas kekuasaan sebagai tujuan utama, sementara hak politik dan kebebasan masyarakat dikorbankan. Dengan demikian, novel ini diposisikan sebagai medium analisis untuk memahami cara kerja kekuasaan negara dalam sistem kepemimpinan otoriter.⁵

Novel tersebut berlatar pada masa menjelang runtuhnya Orde Baru, menggambarkan kehidupan sekelompok aktivis mahasiswa yang berjuang melawan ketidakadilan dan korupsi kekuasaan. Kisah tokoh utama, Biru Laut, dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa dalam sistem politik yang otoriter, perjuangan ideologis untuk demokrasi sering kali berujung pada penderitaan. Mereka menjadi korban penghilangan paksa sebuah praktik politik yang memang terjadi secara nyata pada periode akhir 1990-an di Indonesia. Dengan demikian, *Laut Bercerita* tidak hanya menghadirkan narasi pribadi, tetapi juga menjadi representasi politik dari kekuasaan negara yang menindas

⁵ Ifra dan Hardi, "Otoritarianisme Orde Baru Dalam Karya Puisi Wiji Thukul."

rakyatnya. Ia menjadi refleksi tentang bagaimana rezim otoriter mengatur kehidupan warga, menghapus perbedaan pendapat, dan menjustifikasi kekerasan atas nama stabilitas nasional.

Dalam perspektif ilmu politik, kepemimpinan otoriter ditandai oleh konsentrasi kekuasaan pada satu pusat pengambilan keputusan serta minimnya mekanisme kontrol dari masyarakat maupun lembaga independen. Pola kepemimpinan ini memungkinkan negara menjalankan kebijakan secara sepihak dan menggunakan aparat sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, praktik kepemimpinan semacam ini tercermin melalui pembatasan partisipasi politik, pengawasan ketat terhadap kelompok kritis, serta penggunaan kekerasan negara sebagai instrumen politik. Dengan menempatkan kepemimpinan otoriter sebagai fokus utama, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pola kekuasaan tersebut direpresentasikan dan dikritisi dalam novel *Laut Bercerita* dari sudut pandang ilmu politik.⁶

Dari perspektif kepemimpinan politik, rezim Orde Baru menampilkan model kepemimpinan otoriter yang bercorak paternalistik dan sentralistik. Soeharto memposisikan diri sebagai “bapak bangsa” yang dianggap tahu segala hal dan berhak menentukan arah kehidupan negara. Konsep ini menciptakan budaya politik patrimonial, di mana loyalitas personal lebih diutamakan daripada akuntabilitas publik. Dalam kerangka teori Max Weber, tipe kepemimpinan ini dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan karismatik yang mengalami transformasi menjadi otoritas tradisional dan

⁶ Fauzan dan Sulaiman, “Jurnal Administrasi Publik: Budaya Politik Sipil dan Pendemokrasian di Indonesia : Political Culture and Democratization in Indonesia : An Political Analysis.”

akhirnya menjadi otoritas legal-rasional yang menyimpang. Kekuasaan yang seharusnya dijalankan berdasarkan aturan justru dikelola secara personal oleh elite penguasa. Akibatnya, sistem pemerintahan berjalan secara tidak transparan dan penuh praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).⁷

Representasi kekerasan dan tindakan represif dalam novel *Laut Bercerita* menunjukkan bagaimana kepemimpinan otoriter negara menggunakan aparat keamanan sebagai instrumen politik untuk mengendalikan oposisi. Praktik seperti penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan pengawasan ketat digambarkan bukan sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan yang sistematis. Pola ini mencerminkan karakter kepemimpinan otoriter yang mengutamakan stabilitas kekuasaan di atas hak politik warga negara. Dengan demikian, novel tersebut memberikan gambaran mengenai cara kerja kekuasaan negara dalam mempertahankan dominasinya pada masa Orde Baru.⁸

Warisan politik Orde Baru telah meninggalkan dampak panjang terhadap struktur kekuasaan dan perilaku elite politik Indonesia pasca-reformasi. Meskipun sistem pemerintahan kini telah bertransformasi menjadi demokrasi konstitusional, pola-pola lama seperti dominasi elite, korupsi politik, dan lemahnya institusi penegak hukum masih tampak jelas. Banyak pengamat menilai bahwa praktik politik transaksional dan sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir kelompok merupakan bentuk replikasi dari gaya kepemimpinan otoriter masa lalu yang beradaptasi dengan situasi demokratis.

⁷ Adi, Culla, and Baru, "Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia."

⁸ Sosial and Volume, "Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik."

Kondisi ini memperlihatkan bahwa reformasi politik tidak serta-merta menghapus budaya kekuasaan lama, tetapi justru memunculkan bentuk-bentuk baru otoritarianisme yang lebih halus (*soft authoritarianism*).⁹

Penelitian terhadap novel *Laut Bercerita* dalam konteks ilmu politik menjadi penting karena novel ini merepresentasikan secara jelas praktik kepemimpinan otoriter negara dalam mengelola dan merespons oposisi politik pada masa Orde Baru. Melalui penggambaran relasi antara negara dan kelompok kritis, novel ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan secara terpusat dan represif sebagai bagian dari strategi mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan kekuasaan. Praktik seperti pengawasan ketat, pembatasan ruang gerak politik, serta penggunaan aparat keamanan digambarkan sebagai mekanisme politik yang dilegitimasi oleh negara dalam sistem kepemimpinan otoriter. Fokus penelitian ini diarahkan pada cara negara memanfaatkan instrumen kekuasaan untuk mengendalikan oposisi dan menjaga dominasi politiknya. Dengan pendekatan tersebut, analisis diarahkan untuk memahami mekanisme politik negara dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya dalam kerangka kepemimpinan otoriter.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara tegas diarahkan pada analisis kepemimpinan otoriter negara pada masa Orde Baru dalam perspektif ilmu politik. Fokus penelitian ditempatkan pada cara negara menjalankan dan mempertahankan

⁹ Hasanah et al., "Etika dan Budaya Politik " Konsep Sistem Politik di Indonesia ".

¹⁰ Kasih, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

kekuasaannya melalui mekanisme sentralisasi pengambilan keputusan, penggunaan kontrol represif, serta pengelolaan oposisi politik sebagai bagian dari strategi stabilisasi kekuasaan. Novel *Laut Bercerita* diposisikan sebagai sumber data yang digunakan untuk membaca dan memahami representasi praktik kekuasaan negara tersebut, bukan sebagai pengalaman individual tokoh. Dengan pembatasan fokus ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai pola kepemimpinan otoriter negara dan cara kerjanya dalam konteks politik Indonesia pada masa Orde Baru, sehingga tetap konsisten berada dalam koridor kajian ilmu politik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepemimpinan otoriter negara pada masa Orde Baru digambarkan dalam novel *Laut Bercerita*?
2. Bagaimana cara negara menjalankan kekuasaannya dalam menghadapi kelompok oposisi politik pada masa Orde Baru sebagaimana digambarkan dalam novel *Laut Bercerita*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kepemimpinan otoriter negara pada masa Orde Baru sebagaimana ditampilkan dalam novel *Laut Bercerita*.
2. Untuk menjelaskan cara negara menjalankan kekuasaannya dalam menghadapi kelompok oposisi politik pada masa Orde Baru sebagaimana digambarkan dalam novel *Laut Bercerita*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam memahami konsep dan praktik kepemimpinan otoriter negara. Melalui analisis terhadap novel *Laut Bercerita*, penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis mengenai cara negara menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya, terutama dalam menghadapi kelompok oposisi politik. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sumber non-konvensional seperti novel dapat digunakan untuk membaca praktik kekuasaan negara dalam kerangka analisis ilmu politik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan peneliti ilmu politik dalam memahami karakteristik kepemimpinan otoriter negara pada masa Orde Baru. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah mengenai mekanisme kekuasaan negara dalam merespons oposisi politik melalui media bacaan yang dekat dengan pembaca. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran dan diskusi akademik terkait kepemimpinan politik dan dinamika kekuasaan negara di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pada beberapa penelitian yang sudah dipublikasi. Berikut beberapa diantara referensi tersebut:

Penelitian pertama berjudul “Legitimasi Negara atas Mahasiswa dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori: Kajian Max Weber” ditulis oleh Deviana Indah Permata Ningrum pada tahun 2018 dari Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk legitimasi negara terhadap mahasiswa dalam novel Laut Bercerita dengan menggunakan teori tindak sosial Max Weber. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan mimetik, yaitu menelaah karya sastra sebagai cerminan kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan teknik simak catat dan dianalisis menggunakan metode sosiologi sastra Max Weber melalui pembacaan hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi negara dalam novel tercermin melalui empat bentuk tindakan sosial, yaitu tindak rasionalitas nilai, tindak rasionalitas instrumental, tindak afektif, dan tindak tradisional yang menggambarkan kekuasaan negara yang represif terhadap mahasiswa dan masyarakat.¹¹

¹¹ Leila et al., “Legitimasi Negara Atas Mahasiswa Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori: Kajian Max Weber.”

Penelitian kedua berjudul “Strategi Perlawanan terhadap Dominasi Kekuasaan Negara dalam Novel Laut Bercerita: Kajian Subaltern” ditulis oleh Nurhadini dan Elsa Mulya Karlina pada tahun 2025 dari Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk dominasi kekuasaan negara serta strategi perlawanan terhadap negara yang direpresentasikan dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan negara dalam novel digambarkan melalui penindasan fisik dan kekerasan, pengendalian serta kesewenang-wenangan, dan pengaruh mental terhadap para aktivis. Adapun strategi perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Biru Laut dan kawan-kawannya meliputi pembukaan ruang representasi bagi suara subaltern, aksi perlawanan terbuka, serta penguatan identitas kolektif dan ideologi politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang menghasilkan data deskriptif dari teks sastra melalui analisis berbasis teori subaltern Gayatri Chakravorty Spivak.¹²

Penelitian ketiga Penelitian berjudul “Representasi Kekerasan dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori” ditulis oleh Yulina Rahmi dan diterbitkan pada tahun 2021 dalam Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya Vol. 11 No. 2. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan dan perlawanan yang direpresentasikan dalam novel Laut Bercerita. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang

¹² Laut dan Kajian, “Strategi Perlawanan Terhadap Dominasi Kekuasaan Negara Dalam Novel Laut Bercerita: Kajian Subaltern.”

mengaitkan teks sastra dengan konteks sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga bentuk kekerasan, yaitu fisik (pemukulan dan penganiayaan), verbal (menuduh dan mengejek), dan birokratik (larangan bagi mantan tahanan politik dan pembatasan kegiatan seni). Selain itu, ditemukan dua bentuk perlawanan, yaitu perlawanan terbuka melalui demonstrasi dan perlawanan tertutup melalui penolakan terhadap ideologi yang dipaksakan negara.¹³

Penelitian keempat berjudul “Otoritarianisme Orde Baru dalam Karya Puisi Wiji Thukul” ditulis oleh Rahma Suryani Ifra, Kurniawati, Abrar, dan Etmi Hardi dan diterbitkan pada tahun 2025 dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP) Volume 8 Nomor 2. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bentuk pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru yang tercermin dalam kumpulan puisi Wiji Thukul berjudul Nyanyian Akar Rumput dan Aku Ingin Jadi Peluru. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan hermeneutika, yang menafsirkan makna-makna sosial dan politik dalam teks sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi-puisi Wiji Thukul merepresentasikan praktik otoritarianisme rezim Orde Baru, meliputi pembungkaman kebebasan berpendapat, kekerasan dan represi terhadap rakyat, intervensi militer dalam kehidupan sosial, serta depolitisasi pendidikan. Karya Thukul menjadi bentuk perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan dan represi kekuasaan, sekaligus mencerminkan realitas sosial, ekonomi, dan politik pada masa tersebut.¹⁴

¹³ Rahmi, “Representasi Kekerasan Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S . Chudori (Representation of Violence in Laut Bercerita Novel By Leila S . Chudori).”

¹⁴ Ifra and Hardi, “Otoritarianisme Orde Baru Dalam Karya Puisi Wiji Thukul.”

Penelitian kelima berjudul “Budaya Politik Sivil dan Pendemokrasian di Indonesia: Sebuah Analisa Politik” ditulis oleh Indra Fauzan dan Nidzam Sulaiman dari Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia, dan diterbitkan pada tahun 2019 dalam Jurnal Administrasi Publik volume 9 nomor 1 halaman 57–67. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses terbentuknya budaya politik di Indonesia sebagai faktor penting yang mendorong terjadinya proses pendemokrasian, khususnya setelah runtuhnya Orde Baru. Penulis menyoroti bahwa banyak kajian terdahulu hanya menekankan faktor ekonomi, militer, dan gerakan mahasiswa, sementara faktor budaya politik sivil justru berperan besar dalam membentuk kesadaran demokratis masyarakat. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai dokumen seperti buku, jurnal, tesis, dan manuskrip yang relevan untuk memahami secara tekstual kondisi politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik sivil yang berkembang di kalangan masyarakat kelas menengah menjadi pemicu utama proses pendemokrasian di Indonesia. Kesadaran politik masyarakat sivil yang tumbuh sejak masa pra-kemerdekaan melalui organisasi sosial, pendidikan, dan pergerakan ideologis telah membentuk nilai-nilai demokratis yang kemudian mencapai puncaknya pada reformasi 1998. Penelitian ini menegaskan bahwa pendemokrasian di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang pembentukan budaya politik sivil, bukan sekadar akibat krisis ekonomi atau tekanan politik semata.¹⁵

¹⁵ Fauzan and Sulaiman, “Jurnal Administrasi Publik : Budaya Politik Sivil dan Pendemokrasian di Indonesia : Political Culture and Democratization in Indonesia : An Political Analysis.”

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian mengenai novel *Laut Bercerita* masih berfokus pada aspek sastra, representasi kekerasan, legitimasi negara, serta strategi perlawanan subaltern dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, analisis wacana, dan teori budaya. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memposisikan *Laut Bercerita* sebagai sumber data kualitatif untuk menganalisis praktik kepemimpinan otoriter negara dalam perspektif ilmu politik. Fokus penelitian tidak diarahkan pada estetika teks atau psikologi tokoh, melainkan pada mekanisme kekuasaan negara, seperti sentralisasi pengambilan keputusan, pengawasan ketat, dan represi terhadap oposisi politik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar baik dari segi fokus, landasan teori, maupun kontribusi keilmuan, sehingga memperkuat posisi kebaruan penelitian dalam kajian ilmu politik.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan peneliti untuk menganalisis fenomena politik yang dikaji dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan untuk memahami cara negara menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya dalam sistem politik yang bersifat otoriter pada masa Orde Baru. Analisis difokuskan pada relasi kekuasaan antara negara dan kelompok oposisi politik sebagaimana direpresentasikan dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori, yang menggambarkan praktik kekuasaan negara yang terpusat dan represif.

Penelitian ini menggunakan Teori Kepemimpinan Otoriter sebagai landasan teori utama. Dalam perspektif ilmu politik, kepemimpinan otoriter dipahami sebagai pola kepemimpinan yang menempatkan kekuasaan pada satu pusat pengambilan keputusan, membatasi partisipasi politik masyarakat, serta menggunakan kontrol dan tindakan represif untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan kekuasaan. Teori ini relevan untuk menjelaskan praktik politik negara pada masa Orde Baru yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan dan pengendalian ketat terhadap oposisi politik.

2.2.1. Teori Kepemimpinan Otoriter

Juan J. Linz, seorang ilmuwan politik terkemuka dari Universitas Yale, mendefinisikan rezim otoriter sebagai sistem politik yang secara fundamental berbeda dari rezim demokratis maupun totaliter. Dalam karyanya *Totalitarian and Authoritarian Regimes* (2000), Linz menyatakan bahwa rezim otoriter ditandai oleh pluralisme politik yang terbatas, tidak adanya ideologi penuntun yang elaboratif, tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif dan intensif, serta kepemimpinan yang menjalankan kekuasaan dalam batas-batas yang tidak terdefinisi dengan jelas namun dapat diprediksi. Kerangka analitis Linz ini memberikan alat yang komprehensif untuk memahami bagaimana rezim otoriter beroperasi, mempertahankan kekuasaan, dan merespons oposisi politik.¹⁶

Berdasarkan definisi Linz tersebut, dapat dipahami bahwa rezim otoriter tidak sekadar merupakan pemerintahan yang keras atau represif, melainkan sebuah sistem politik yang memiliki karakteristik struktural yang khas. Rezim otoriter mempertahankan

¹⁶ Linz, *Totalitarian and Authoritarian Regimes*.

kekuasaan bukan melalui mobilisasi massa seperti rezim totaliter, melainkan melalui pembatasan partisipasi politik, penciptaan apatisme, dan pengendalian yang selektif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. Pemahaman ini menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana karakter rezim otoriter tercermin dalam novel *Laut Bercerita*.

Dalam perspektif ilmu politik, Linz membedakan rezim otoriter dari rezim totaliter berdasarkan intensitas kontrol negara terhadap masyarakat. Rezim totaliter seperti fasisme dan komunisme berupaya mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh melalui ideologi yang elaboratif dan mobilisasi massa yang intensif. Sebaliknya, rezim otoriter cukup puas dengan kepatuhan politik masyarakat tanpa harus mengubah cara berpikir mereka secara menyeluruh. Hal ini menjadikan rezim otoriter lebih toleran terhadap pluralisme yang bersifat terbatas di bidang ekonomi dan sosial, selama hal tersebut tidak mengancam dominasi politik penguasa. Karakteristik ini sangat relevan untuk memahami cara kerja rezim Orde Baru yang membolehkan aktivitas ekonomi swasta namun secara ketat mengontrol ruang politik.

Linz (2000) menjelaskan bahwa rezim otoriter berkembang dalam berbagai konteks sejarah dan geografis, namun selalu menunjukkan pola yang konsisten dalam hal pengelolaan kekuasaan. Penguasa dalam rezim otoriter cenderung menggunakan aparat keamanan, kontrol birokrasi, dan jaringan patronase untuk mempertahankan dominasi. Kritik dan oposisi tidak diakomodasi sebagai bagian dari dinamika politik yang legitim, melainkan dipandang sebagai ancaman yang harus dikendalikan. Kondisi ini menciptakan atmosfer politik di mana masyarakat cenderung bersikap pasif dan menghindari

keterlibatan dalam aktivitas yang dianggap berseberangan dengan kepentingan penguasa. Dalam konteks Orde Baru Indonesia, karakteristik-karakteristik ini termanifestasi secara nyata melalui berbagai praktik kekuasaan yang digambarkan dalam novel *Laut Bercerita*.¹⁷

Indikator kepemimpinan otoriter dalam penelitian ini merujuk pada konsep rezim otoriter yang dikemukakan oleh Juan J. Linz dalam karyanya *Totalitarian and Authoritarian Regimes* (2000), yang kemudian disesuaikan dengan konteks kepemimpinan negara pada masa Orde Baru dalam perspektif ilmu politik. Menurut Linz, rezim otoriter memiliki empat karakteristik utama yang membedakannya dari rezim totaliter maupun demokratis. Keempat karakteristik tersebut digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini untuk menganalisis representasi kepemimpinan otoriter negara dalam novel *Laut Bercerita*. Ciri-ciri atau indikator kepemimpinan otoriter menurut Juan J. Linz (2000) yaitu:

- 1) Pluralisme politik yang terbatas (Limited Political Pluralism): Rezim otoriter tidak mengizinkan pluralisme politik yang penuh. Kelompok politik, organisasi masyarakat, dan media hanya diperbolehkan beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh negara. Oposisi politik dikontrol, dibatasi, atau dihilangkan sama sekali demi menjaga stabilitas kekuasaan.
- 2) Tidak ada ideologi elaboratif (No Elaborate Guiding Ideology): Berbeda dengan rezim totaliter yang memiliki ideologi tunggal yang menyeluruh, rezim otoriter

¹⁷ "Lewin, Kurt, Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates. , Journal of Social Psychology: 271

tidak memiliki ideologi yang elaboratif. Sebaliknya, rezim ini mengandalkan mentalitas dominan (dominant mentality) berupa slogan, narasi keamanan nasional, atau konsep-konsep seperti “stabilitas dan pembangunan” yang digunakan untuk membenarkan dan melegitimasi kekuasaan penguasa.

3) Tidak ada mobilisasi politik yang ekstensif (No Extensive Political Mobilization):

Rezim otoriter tidak memobilisasi rakyat secara aktif dan masif untuk mendukung tujuan politik negara sebagaimana dilakukan rezim totaliter. Sebaliknya, rezim otoriter justru mengondisikan apatisme politik di kalangan masyarakat. Keterlibatan publik dalam politik dibatasi, dan masyarakat didorong untuk tidak aktif secara politik agar kekuasaan elite tetap terjaga.

4) Kepemimpinan yang tidak terbatas (Leadership Without Extensive

Accountability): Pemimpin dalam rezim otoriter berkuasa tanpa batasan formal yang efektif. Tidak ada mekanisme akuntabilitas yang sungguh-sungguh dari lembaga legislatif, yudikatif, maupun masyarakat. Kekuasaan bersifat personal dan sering kali dieksekusi melalui aparat keamanan, jaringan loyalis, serta patronase politik untuk mempertahankan dominasi dan mencegah munculnya tantangan terhadap kekuasaan.¹⁸

¹⁸ Linz, *Totalitarian and Authoritarian Regimes*.

2.2.2. Konsep Politik Belah Bambu (Teori Pendukung)

Selain Teori Kepemimpinan Otoriter Juan J. Linz, penelitian ini juga menggunakan konsep politik belah bambu sebagai teori pendukung untuk memperkaya analisis. Politik belah bambu adalah istilah yang lazim digunakan dalam wacana politik Indonesia untuk menggambarkan strategi kekuasaan yang memecah suatu kelompok atau kekuatan politik yang semula bersatu, dengan cara mengistimewakan satu pihak sekaligus menekan pihak lain, sehingga oposisi tidak pernah terkonsolidasi menjadi kekuatan tunggal yang mengancam penguasa. Praktik ini digunakan secara konsisten sejak masa kolonial Belanda hingga masa Orde Baru, antara lain melalui kebijakan fusi partai politik yang menyederhanakan kekuatan politik menjadi tiga partai, yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan, sembari menempatkan Golkar sebagai kendaraan politik utama pemerintah dan melemahkan partai-partai lain secara struktural.

Dalam kajian ilmu politik mengenai Indonesia, pola relasi kekuasaan semacam ini juga dibahas melalui konsep kooptasi dan patronase, yaitu cara penguasa mempertahankan dominasi dengan merangkul kelompok yang bersedia tunduk, sekaligus menyingkirkan kelompok yang dianggap mengancam, alih-alih melakukan represi yang merata terhadap seluruh oposisi.¹⁹

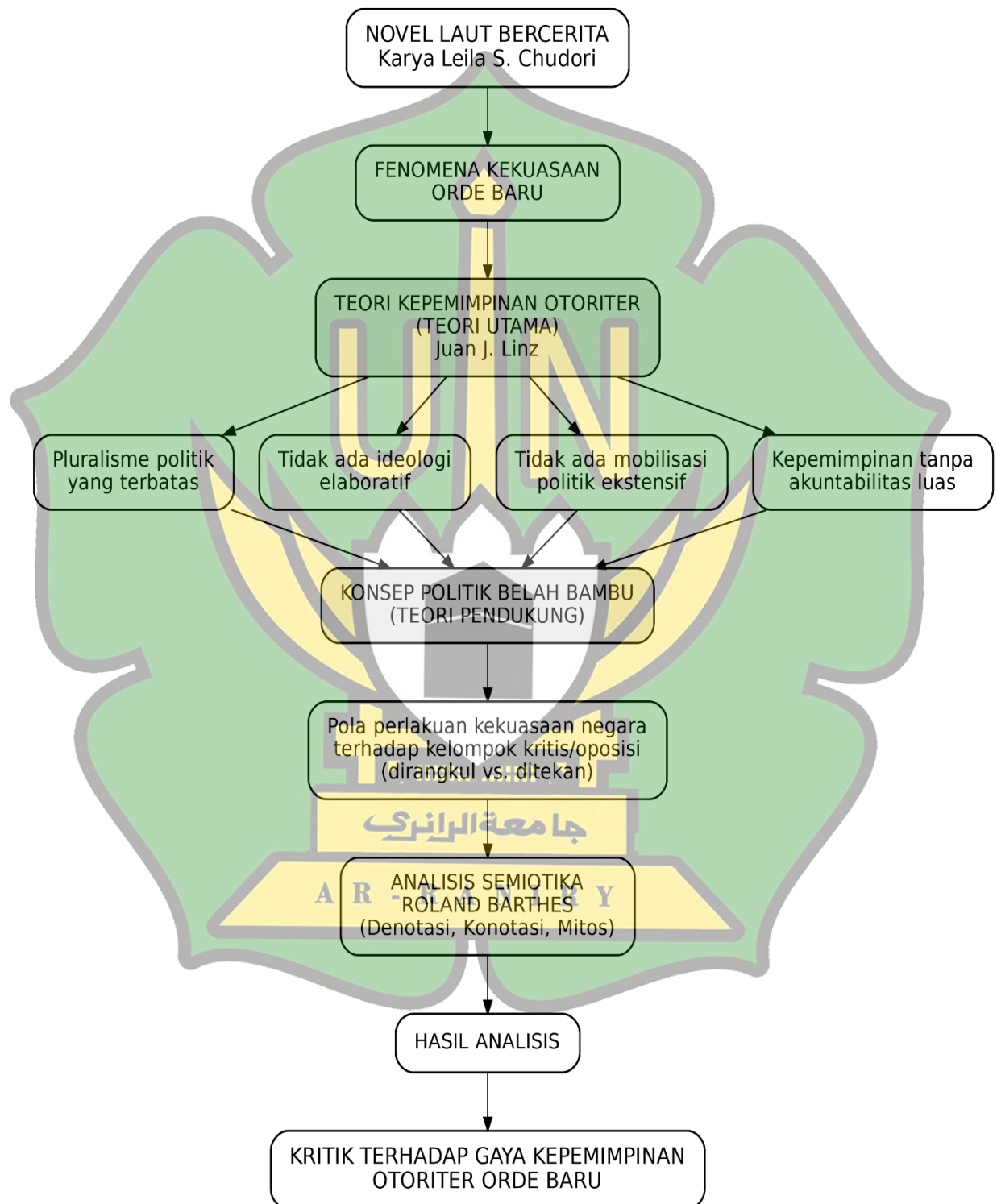
Konsep politik belah bambu digunakan dalam penelitian ini sebagai teori pendukung, bukan sebagai kerangka analisis utama. Konsep ini digunakan untuk

¹⁹ Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia* (Stanford: Stanford University Press, 2010).

memperkaya pembacaan terhadap indikator pluralisme politik yang terbatas dan tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif sebagaimana dikemukakan oleh Linz, dengan menjelaskan mekanisme di baliknya, yaitu bagaimana negara pada masa Orde Baru tidak semata-mata merepresi seluruh kelompok oposisi secara seragam, melainkan memilah kelompok mana yang dirangkul dan kelompok mana yang ditekan, sebagaimana tampak dalam perlakuan negara terhadap tokoh-tokoh dan kelompok oposisi dalam novel Laut Bercerita.



2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi penelitian secara geografis tertentu. Hal ini dikarenakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Oleh karena itu, proses penelitian tidak bergantung pada tempat atau wilayah tertentu sebagaimana penelitian lapangan.

Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui penelaahan sumber tertulis, dengan objek utama berupa novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori serta didukung oleh berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan kajian kepemimpinan otoriter dan politik Orde Baru. Dengan demikian, lokasi penelitian dalam penelitian ini bersifat non-fisik dan berfokus pada sumber data kepustakaan.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik melalui penafsiran terhadap data yang bersifat non-numerik. Fokus penelitian diarahkan pada analisis makna dan pola kekuasaan negara yang ditampilkan dalam teks.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika Roland Barthes. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tanda (sign) dan cara tanda-tanda tersebut memproduksi makna dalam teks. Roland Barthes, seorang teorisi sastra dan

budaya asal Prancis, mengembangkan semiotika ke dalam ranah analisis ideologi dan kekuasaan melalui karyanya *Mythologies* (1957). Barthes membangun sistem pemaknaan berlapis yang terdiri atas tiga tingkatan, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi adalah makna literal atau makna permukaan yang langsung dapat dipahami dari teks. Konotasi adalah makna tersembunyi yang bersifat kultural, historis, dan ideologis yang tersirat di balik tanda. Adapun mitos adalah tingkatan tertinggi di mana ideologi kekuasaan dinaturalisasi sehingga tampak wajar dan alami, padahal sesungguhnya bersifat historis dan konstruktif. Pendekatan semiotika Barthes dipilih karena mampu membongkar cara kerja ideologi yang tersembunyi di balik narasi teks novel, khususnya bagaimana praktik kepemimpinan otoriter Orde Baru direpresentasikan dan dikritik melalui sistem tanda dalam novel *Laut Bercerita*. Teori rezim otoriter Juan J. Linz digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menentukan indikator analisis, sementara semiotika Barthes digunakan sebagai pendekatan metodologis untuk membedah sistem tanda dalam teks secara sistematis dan bertingkat.²⁰

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena objek penelitian berupa teks, sehingga data dikumpulkan tanpa melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian.

²⁰ Barthes, *Mythologies*.

Data utama diperoleh melalui pembacaan dan penelaahan secara mendalam terhadap novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori. Selain itu, data pendukung dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas kepemimpinan otoriter, politik Orde Baru, serta kajian ilmu politik yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan bagian-bagian teks yang berkaitan dengan indikator kepemimpinan otoriter. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis pada tahap selanjutnya.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup:

4.2. Data Primer

Sumber data primer berasal dari novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori yang menjadi objek utama penelitian. Dalam penelitian ini novel *Laut Bercerita* digunakan sebagai sumber data utama karena memuat berbagai peristiwa, narasi, dan gambaran mengenai relasi antara negara dan kelompok yang berseberangan dengan kekuasaan pada masa Orde Baru. Melalui teks novel tersebut, peneliti memperoleh data berupa penggambaran tindakan negara, cara kekuasaan dijalankan, serta respons negara terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas politik. Seluruh data primer diperoleh

melalui pembacaan mendalam terhadap isi novel dan pencatatan bagian-bagian teks yang berkaitan dengan fokus penelitian.

5.2.Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks terhadap data primer. Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen tertulis lainnya yang membahas dinamika politik pada masa Orde Baru, praktik kekuasaan negara, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Data sekunder digunakan untuk membantu peneliti memahami latar historis dan konseptual yang melingkupi objek penelitian serta sebagai bahan pembandingan dalam proses analisis.

Seluruh sumber data dalam penelitian ini bersifat tertulis dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan maupun interaksi langsung dengan subjek penelitian. Data yang telah dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis untuk dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui teknik analisis semiotika Roland Barthes. Pendekatan semiotika digunakan untuk membaca tanda-tanda dalam teks novel secara bertingkat, mulai dari makna permukaan hingga makna ideologis yang tersembunyi di balik narasi. Objek

penelitian berupa teks dalam novel *Laut Bercerita*, yang dianalisis untuk memahami bagaimana praktik kepemimpinan otoriter negara direpresentasikan melalui sistem tanda dalam teks, khususnya dalam relasi antara negara dan kelompok oposisi politik pada masa Orde Baru. Teori rezim otoriter Juan J. Linz digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menentukan indikator analisis, sementara semiotika Barthes digunakan sebagai prosedur metodologis untuk membedah makna tanda-tanda dalam teks novel secara sistematis.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tingkatan makna dalam semiotika Roland Barthes, yaitu:²¹

1. Denotasi

Pada tingkatan pertama ini, peneliti membaca dan mendeskripsikan makna literal atau makna permukaan dari teks novel. Denotasi adalah makna yang paling nyata dan langsung dapat dipahami dari suatu tanda. Peneliti mengidentifikasi narasi, dialog, peristiwa, dan penggambaran tokoh yang berkaitan dengan praktik kekuasaan negara sebagaimana tertulis secara eksplisit dalam teks.

2. Konotasi

Pada tingkatan kedua ini, peneliti menafsirkan makna tersembunyi atau makna yang tersirat di balik tanda-tanda dalam teks. Konotasi adalah makna sekunder yang

²¹ Barthes, *Mythologies*.

muncul dari asosiasi budaya, historis, dan ideologis yang melekat pada tanda. Peneliti mengkaji bagaimana pilihan kata, simbol, dan penggambaran peristiwa dalam novel menyiratkan kritik terhadap praktik kekuasaan otoriter negara pada masa Orde Baru.

3. Mitos

Pada tingkatan ketiga ini, peneliti mengungkap bagaimana tanda-tanda dalam teks berfungsi sebagai mitos, yaitu cara ideologi kekuasaan dinaturalisasi dan dibuat tampak wajar serta tidak dapat diganggu gugat. Barthes mendefinisikan mitos sebagai sistem komunikasi di mana ideologi yang bersifat historis dan konstruktif disajikan seolah-olah sebagai sesuatu yang alami dan universal. Dalam konteks penelitian ini, mitos yang dianalisis adalah bagaimana narasi “stabilitas nasional” dan “pembangunan” digunakan oleh rezim Orde Baru untuk melegitimasi praktik kekuasaan yang represif sebagaimana tercermin dalam teks novel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengambil latar sejarah politik Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya pada periode menjelang berakhirnya kekuasaan rezim tersebut. Masa ini merupakan fase penting dalam sejarah politik Indonesia karena ditandai oleh kuatnya dominasi negara dalam kehidupan politik, terbatasnya ruang partisipasi publik, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara.

Dalam novel *Laut Bercerita*, relasi tersebut direpresentasikan melalui penggambaran interaksi antara negara dan kelompok masyarakat yang bersikap kritis terhadap kekuasaan. Negara digambarkan menjalankan kontrol yang ketat terhadap aktivitas politik, membatasi ruang partisipasi, serta merespons oposisi melalui mekanisme pengawasan dan penertiban. Gambaran ini mencerminkan praktik kepemimpinan negara yang bersifat terpusat dan menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama dalam pengelolaan kekuasaan.²²

²² Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*.

Penelitian ini memposisikan *Laut Bercerita* sebagai sumber data tertulis yang digunakan untuk membaca dan memahami representasi praktik kekuasaan negara. Fokus analisis diarahkan pada tindakan dan kebijakan negara sebagaimana ditampilkan dalam teks, khususnya yang berkaitan dengan pola kepemimpinan negara dalam menghadapi kelompok oposisi. Dengan pembatasan fokus tersebut, novel digunakan sebagai medium untuk mengkaji bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan dalam konteks politik Indonesia pada masa Orde Baru.²³

Pemilihan novel *Laut Bercerita* sebagai objek penelitian didasarkan pada relevansinya dalam menggambarkan dinamika hubungan negara dan masyarakat pada masa Orde Baru. Novel ini menyajikan gambaran yang konsisten mengenai praktik kekuasaan negara yang terpusat, terbatasnya partisipasi politik, serta kuatnya kontrol negara terhadap aktivitas politik masyarakat. Oleh karena itu, objek penelitian ini dinilai sesuai untuk digunakan dalam kajian ilmu politik yang berfokus pada analisis kepemimpinan negara dalam sistem politik otoriter.

4.1.1. Profil Novel Laut Bercerita

Laut Bercerita merupakan novel karya Leila S. Chudori yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Novel ini termasuk dalam kategori novel sejarah dan politik karena mengangkat berbagai peristiwa

²³ Winters, "Indonesia The Rise of Capital: A Review Essay."

yang memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial-politik Indonesia menjelang Reformasi 1998.

Novel ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama berjudul “Laut” yang berfokus pada pengalaman tokoh utama Biru Laut sebagai seorang mahasiswa dan aktivis yang terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Bagian ini menggambarkan berbagai bentuk tekanan yang dialami aktivis, mulai dari pengawasan, pengejaran, penangkapan, hingga penyiksaan.

Bagian kedua berjudul “Asmara Jati” yang diceritakan dari sudut pandang adik Biru Laut. Bagian ini berfokus pada perjuangan keluarga korban penghilangan paksa dalam mencari kepastian mengenai nasib anggota keluarga mereka yang hilang. Melalui dua sudut pandang tersebut, novel ini tidak hanya menampilkan pengalaman korban secara langsung, tetapi juga memperlihatkan dampak sosial dan psikologis yang dialami keluarga korban.

Keunggulan novel *Laut Bercerita* terletak pada kemampuannya menghadirkan peristiwa politik melalui pengalaman manusia yang konkret. Pembaca tidak hanya disajikan informasi mengenai praktik kekuasaan negara, tetapi juga diajak memahami dampak kebijakan politik terhadap kehidupan individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, novel ini banyak digunakan sebagai bahan diskusi mengenai hak asasi manusia, demokrasi, dan sejarah politik Indonesia.

4.1.2. Biografi Singkat Leila S.Chudori

Leila Salikha Chudori lahir di Jakarta pada 12 Desember 1962. Ia merupakan seorang jurnalis, penulis, dan sastrawan Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya yang banyak mengangkat tema sejarah, politik, identitas, dan kemanusiaan. Sejak usia muda, Leila telah menunjukkan minat yang besar terhadap dunia kepenulisan dan mulai menulis cerpen di berbagai media massa.

Karier profesional Leila berkembang ketika ia bergabung sebagai jurnalis di Majalah Tempo. Pengalaman sebagai wartawan memberikan pengaruh yang kuat terhadap karya-karyanya, terutama dalam menghadirkan detail peristiwa sejarah dan politik secara mendalam. Banyak karya Leila lahir dari proses riset yang panjang dan didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi di Indonesia.

Sebelum menerbitkan *Laut Bercerita*, Leila telah dikenal luas melalui novel *Pulang* yang diterbitkan pada tahun 2012. Novel tersebut mengangkat kisah para eksil politik Indonesia pasca peristiwa 1965 dan memperoleh berbagai penghargaan sastra. Konsistensi Leila dalam mengangkat isu hak asasi manusia, kekerasan negara, dan pengalaman kelompok marginal menjadikan karya-karyanya memiliki nilai penting dalam kajian sosial dan politik.

Melalui *Laut Bercerita*, Leila berupaya menghadirkan kembali ingatan kolektif masyarakat mengenai praktik penghilangan paksa yang terjadi menjelang Reformasi 1998. Dengan demikian, novel ini tidak hanya berfungsi sebagai karya sastra, tetapi juga

sebagai media untuk merekam dan mengingat berbagai pengalaman sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia.

4.1.3. Sinopsis Novel Laut Bercerita

Novel *Laut Bercerita* berpusat pada kisah Biru Laut, seorang mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan gerakan sosial yang mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Bersama rekan-rekannya dalam kelompok aktivis, Biru Laut berusaha menyuarakan berbagai persoalan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.

Aktivitas tersebut membuat mereka menjadi sasaran pengawasan aparat negara. Dalam perjalanan cerita, Biru Laut dan beberapa rekannya ditangkap secara paksa, ditahan, dan mengalami berbagai bentuk penyiksaan selama proses interogasi. Sebagian dari mereka kemudian menjadi korban penghilangan paksa dan tidak pernah kembali kepada keluarga mereka.

Setelah hilangnya Biru Laut, cerita beralih kepada Asmara Jati yang berusaha mencari keberadaan kakaknya. Melalui sudut pandang Asmara Jati, pembaca diperlihatkan bagaimana keluarga korban harus menghadapi ketidakpastian, kehilangan, dan perjuangan panjang untuk memperoleh keadilan.

Secara keseluruhan, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan terhadap kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Narasi tersebut menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara negara dan

masyarakat, di mana negara memiliki kemampuan untuk mengontrol, mengawasi, dan menindak kelompok oposisi politik.

4.1.4. Konteks Politik Orde Baru

Novel *Laut Bercerita* berlatar pada masa Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam sejarah politik Indonesia, periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi melalui sistem kekuasaan yang terpusat.

Salah satu karakteristik utama Orde Baru adalah dominasi negara terhadap kehidupan politik masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengontrol aktivitas politik melalui pembatasan partai politik, pengawasan terhadap organisasi masyarakat, pembatasan kebebasan pers, serta penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam praktiknya, berbagai kelompok yang dianggap mengancam pemerintah sering kali menghadapi tindakan represif dari negara.

Menurut Harold Crouch (1978), kekuasaan Orde Baru ditopang oleh hubungan erat antara birokrasi negara dan militer sehingga menciptakan sistem politik yang sangat terpusat. Sementara itu, Juan J. Linz (2000) menjelaskan bahwa rezim otoriter ditandai oleh pluralisme politik yang terbatas, lemahnya akuntabilitas politik, minimnya partisipasi politik masyarakat, serta dominasi elite penguasa dalam proses pengambilan keputusan.

Karakteristik tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa yang direpresentasikan dalam novel *Laut Bercerita*. Aktivitas kelompok mahasiswa dan aktivis yang digambarkan dalam novel menunjukkan bagaimana negara membatasi ruang gerak politik masyarakat serta menggunakan instrumen kekuasaan untuk mempertahankan stabilitas politik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konteks politik Orde Baru menjadi penting untuk memahami representasi kepemimpinan negara yang ditampilkan dalam novel.

Dengan memahami konteks tersebut, analisis pada bagian selanjutnya dapat dilakukan secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik kepemimpinan otoriter negara direpresentasikan melalui berbagai peristiwa, dialog, dan tindakan yang terdapat dalam novel *Laut Bercerita*.

4.2. Representasi Kepemimpinan Negara dalam Novel *Laut Bercerita*

Representasi kepemimpinan negara dalam novel *Laut Bercerita* ditampilkan melalui relasi kekuasaan yang terbentuk antara negara dan masyarakat dalam konteks politik Orde Baru. Negara digambarkan sebagai aktor politik yang memiliki otoritas dominan dalam mengatur kehidupan politik, menentukan arah kebijakan, serta mengendalikan ruang partisipasi publik. Kepemimpinan negara tidak hanya tercermin dalam keputusan politik yang bersifat formal, tetapi juga dalam praktik pengendalian sosial dan politik yang membentuk perilaku masyarakat.

Dalam novel tersebut, negara direpresentasikan sebagai aktor yang memiliki kontrol dominan terhadap kehidupan masyarakat. Kekuasaan negara tidak hanya terlihat

dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengatur, mengawasi, dan membatasi ruang gerak individu maupun kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan negara bersifat sentralistik dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik.²⁴

Selain itu, kepemimpinan negara dalam novel juga ditunjukkan melalui penggunaan aparat keamanan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Negara tidak segan menggunakan pendekatan represif terhadap kelompok yang dianggap sebagai ancaman, seperti aktivis mahasiswa. Tindakan seperti penangkapan, interogasi, dan penghilangan paksa mencerminkan bahwa kekuasaan negara dijalankan dengan cara-cara koersif.²⁵

Representasi ini sejalan dengan konsep kepemimpinan otoriter yang menekankan dominasi penguasa dan minimnya kontrol dari masyarakat. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan tidak hanya digunakan untuk mengatur, tetapi juga untuk mengendalikan dan menekan oposisi. Kritik terhadap negara tidak dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, melainkan sebagai ancaman yang harus dihilangkan.

Lebih jauh, kepemimpinan negara dalam novel juga memperlihatkan adanya upaya pembentukan legitimasi melalui kontrol wacana. Negara tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga berupaya membentuk cara berpikir masyarakat

²⁴ Richard Robison, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*.

²⁵ Heryanto, *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture*.

agar menerima kekuasaan yang ada. Dalam hal ini, kepemimpinan negara tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga ideologis.

Dalam teks novel, kepemimpinan negara dijalankan dengan pola yang menempatkan stabilitas politik sebagai tujuan utama. Negara memandang keberagaman pandangan politik dan aktivitas kelompok kritis sebagai potensi gangguan terhadap tatanan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan dan tindakan negara diarahkan untuk memastikan kepatuhan politik dan meminimalkan ruang perbedaan. Pola ini menunjukkan karakter kepemimpinan yang menekankan kontrol dan ketertiban sebagai dasar pengelolaan kekuasaan.

Kepemimpinan negara juga direpresentasikan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat tertutup dan terpusat. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk memengaruhi proses politik, sementara keputusan strategis ditetapkan oleh elite penguasa tanpa melibatkan partisipasi publik secara substantif. Kondisi ini mencerminkan lemahnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara dan memperkuat dominasi negara dalam sistem politik.

Selain itu, novel *Laut Bercerita* menggambarkan adanya pengawasan yang intensif terhadap aktivitas politik masyarakat. Negara digambarkan memiliki kapasitas untuk memantau, membatasi, dan mengintervensi kegiatan kelompok yang dianggap berseberangan dengan kebijakan politik yang berlaku. Praktik pengawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat keamanan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan dan menekan potensi oposisi.

Representasi kepemimpinan negara dalam novel ini juga terlihat dari cara negara merespons kritik dan aspirasi masyarakat. Kritik tidak diposisikan sebagai bagian dari proses politik yang wajar, melainkan sebagai bentuk pembangkangan yang harus dikendalikan. Akibatnya, ruang dialog politik menjadi terbatas dan hubungan antara negara dan masyarakat berlangsung secara tidak setara. Pola hubungan ini mempertegas karakter kepemimpinan yang cenderung otoriter dan kurang responsif terhadap aspirasi publik.

Representasi kepemimpinan negara dalam novel ini juga ditunjukkan melalui cara negara membangun relasi kekuasaan yang bersifat hierarkis. Negara ditempatkan pada posisi yang superior, sementara masyarakat berada dalam posisi yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak penguasa. Relasi hierarkis ini membentuk pola kepemimpinan yang tidak memberikan ruang keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga, sehingga keputusan politik sepenuhnya ditentukan dari atas ke bawah.

Lebih jauh, *Laut Bercerita* merepresentasikan kepemimpinan negara sebagai entitas yang minim akuntabilitas politik. Tidak terlihat adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara. Ketiadaan akuntabilitas ini memperkuat karakter kepemimpinan yang tertutup dan sulit dikoreksi, sehingga kekuasaan negara berjalan tanpa kontrol yang seimbang dari luar struktur kekuasaan.

Analisis representasi kepemimpinan negara dalam novel ini menggunakan keempat indikator rezim otoriter menurut Juan J. Linz (2000), yaitu: (1) pluralisme politik

yang terbatas, (2) tidak adanya ideologi elaboratif, (3) tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif, dan (4) kepemimpinan tanpa akuntabilitas yang luas. Setiap indikator dianalisis melalui tiga tingkatan semiotika Roland Barthes, yaitu denotasi (makna literal teks), konotasi (makna ideologis yang tersembunyi), dan mitos (naturalisasi ideologi kekuasaan). Melalui kerangka ini, analisis tidak hanya membaca peristiwa yang digambarkan novel, tetapi juga membongkar cara kerja ideologi yang menopang kepemimpinan otoriter pada masa Orde Baru.

4.2.1. Pluralisme Politik yang Terbatas (Limited Political Pluralism)

Indikator pertama kepemimpinan otoriter menurut Juan J. Linz adalah pluralisme politik yang terbatas (*limited political pluralism*). Linz menjelaskan bahwa rezim otoriter tidak sepenuhnya menghapus organisasi masyarakat maupun aktivitas politik, tetapi membatasi ruang geraknya melalui berbagai instrumen kekuasaan sehingga tidak berkembang menjadi kekuatan oposisi yang mampu mengancam stabilitas rezim. Dalam sistem seperti ini, negara menentukan batas-batas partisipasi politik masyarakat, mengawasi aktivitas kelompok kritis, serta menggunakan aparat keamanan untuk mengendalikan setiap bentuk perbedaan pendapat. Dengan demikian, pluralisme politik tetap ada, tetapi berada di bawah kontrol negara dan tidak memiliki kebebasan yang sesungguhnya.

Representasi pluralisme politik yang terbatas dalam novel *Laut Bercerita* terlihat melalui berbagai tindakan negara yang membatasi kebebasan berpikir, berdiskusi, dan menyampaikan kritik. Salah satu representasi tersebut tampak pada kutipan berikut.

"Hati-hati saja, Mas. Bapak kan tetap mengikuti nasib para aktivis yang dipenjara hanya karena berdiskusi buku karya Pak Pram." (Chudori, 2017: 75)

Analisis Denotasi

Pada tataran denotasi, kutipan tersebut memperlihatkan adanya peringatan terhadap aktivitas diskusi buku karena sebelumnya terdapat aktivis yang dipenjara setelah melakukan kegiatan serupa. Secara langsung, peristiwa itu menunjukkan bahwa diskusi buku tidak berlangsung dalam ruang yang bebas, melainkan berada dalam bayang-bayang pengawasan dan ancaman aparat.

Analisis Konotasi

Ironisnya, ancaman dalam kutipan tersebut tidak hadir dalam bentuk senjata atau aparat yang berdiri di depan mata, melainkan melalui sebuah buku. Peringatan "hati-hati" memperlihatkan bahwa negara telah berhasil mengubah aktivitas yang semestinya menjadi bagian dari kehidupan intelektual menjadi sesuatu yang berisiko secara politik. Yang lebih penting, frasa "dipenjara hanya karena berdiskusi buku" memperlihatkan bahwa ketakutan telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Ancaman tidak lagi harus hadir secara langsung karena pengalaman penangkapan terhadap orang lain sudah cukup untuk membuat masyarakat mengukur sendiri batas perilakunya.

Penyebutan karya Pramoedya Ananta Toer memperkuat makna tersebut. Buku tidak lagi diposisikan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi sebagai penanda yang dapat memunculkan kecurigaan politik. Dengan demikian, kekuasaan bekerja bukan

hanya dengan melarang tindakan tertentu, tetapi dengan menciptakan kondisi ketika masyarakat mulai melakukan sensor terhadap dirinya sendiri: apa yang dibaca, apa yang dibicarakan, dan sejauh mana gagasan kritis boleh dipertukarkan.

Analisis Mitos

Pada tingkat mitos, kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana gagasan mengenai "keamanan negara" dapat digunakan untuk menormalisasi pembatasan terhadap kebebasan intelektual. Ketika diskusi buku diperlakukan sebagai sesuatu yang berbahaya, tindakan represif terhadap peserta diskusi dapat dipersepsikan sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban. Di sinilah kekuasaan tidak hanya mengatur tindakan masyarakat, tetapi juga membentuk batas mengenai gagasan apa yang dianggap aman untuk beredar.

Dalam perspektif semiotika Roland Barthes, proses tersebut menunjukkan naturalisasi makna kekuasaan: pembatasan terhadap ruang berpikir perlahan tampak sebagai sesuatu yang wajar karena dibungkus dalam bahasa keamanan dan stabilitas. Padahal, di balik kewajaran tersebut terdapat relasi kekuasaan yang menempatkan negara sebagai pihak yang berhak menentukan batas antara gagasan yang dianggap sah dan gagasan yang dianggap mengancam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa represi terhadap diskusi buku tidak berhenti pada penghukuman terhadap individu. Dampak politiknya lebih luas, yaitu menciptakan efek jera terhadap masyarakat yang menyaksikannya. Ketika seseorang memilih berhati-

hati sebelum membaca atau berdiskusi, negara telah memperoleh bentuk kontrol yang lebih halus: masyarakat ikut menjaga batas yang sebenarnya dibentuk oleh kekuasaan.

Temuan tersebut memperlihatkan karakter limited political pluralism sebagaimana dikemukakan Juan J. Linz. Dalam rezim otoriter, pluralisme tidak harus dihapus seluruhnya; yang lebih penting bagi penguasa adalah memastikan bahwa perbedaan tidak berkembang menjadi kekuatan yang mampu menantang dominasi politik. Dalam kutipan ini, pembatasan terhadap diskusi menunjukkan bahwa ruang pertukaran gagasan pun berada dalam batas yang ditentukan oleh kekuasaan. Dengan kata lain, pluralisme masih mungkin tampak hidup, tetapi daya kritisnya dibuat tidak berdaya.

Dengan demikian, persoalan dalam kutipan tersebut bukan sekadar adanya penangkapan aktivis, melainkan terciptanya lingkungan politik yang membuat masyarakat belajar untuk takut sebelum bertindak. Di titik inilah pembatasan pluralisme menjadi efektif: negara tidak perlu hadir di setiap ruang diskusi karena rasa takut telah membuat individu mengantisipasi sendiri kemungkinan hukuman yang mungkin mereka terima.

Konteks tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan ruang intelektual pada masa Orde Baru memiliki konsekuensi politik yang lebih luas. Ketika bacaan, diskusi, dan organisasi mahasiswa berada dalam pengawasan, ruang publik kehilangan fungsinya sebagai tempat pertukaran gagasan secara bebas. Aktivitas yang seharusnya dapat menjadi sarana pembentukan kritik justru ditempatkan dalam kerangka keamanan negara.

Dengan demikian, novel *Laut Bercerita* merepresentasikan pluralisme politik bukan sebagai ruang yang sepenuhnya tertutup, melainkan sebagai ruang yang sengaja dipersempit dan dibuat berisiko bagi kelompok yang kritis. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa otoritarianisme dapat bekerja melalui pembatasan yang tidak selalu tampak sebagai larangan terbuka, tetapi terasa dalam keputusan masyarakat untuk memilih diam, berhati-hati, atau tidak terlibat.

Keterbatasan pluralisme politik dalam novel *Laut Bercerita* juga tergambar melalui rasa takut yang dialami para aktivis dalam mengakses dan menyebarkan bacaan alternatif. Kondisi tersebut terlihat dalam kutipan berikut:

Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja menggelayuti Yogyakarta, membawa-bawa fotokopi buku karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan menentang bom: Kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa. (Chudori, 2017: 20)

Analisis Denotasi

Pada tataran denotasi, kutipan tersebut menggambarkan suasana Yogyakarta yang masih dibayangi penangkapan aktivis. Dalam kondisi tersebut, membawa fotokopi karya Pramoedya Ananta Toer disamakan dengan membawa bom karena dapat membuat seseorang dicurigai sebagai pihak yang berbahaya dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa.

Analisis Konotasi

Ungkapan "sama saja dengan menenteng bom" menjadi titik penting dalam membaca cara kerja kekuasaan. Sebuah buku, yang secara material tidak memiliki daya rusak seperti senjata, justru memperoleh makna sebagai ancaman. Perubahan makna tersebut menunjukkan bahwa yang ditakuti negara bukan benda bukunya, melainkan kemungkinan gagasan yang dibawahnya membentuk kesadaran kritis dan memperluas keberanian masyarakat untuk mempertanyakan kekuasaan.

Sementara itu, label "pengkhianat bangsa" memperlihatkan bahwa kontrol politik juga bekerja melalui stigma. Ketika pembaca bacaan alternatif ditempatkan sebagai pengkhianat, perbedaan pandangan tidak lagi diperlakukan sebagai bagian yang sah dari kehidupan politik. Label tersebut membuat kritik kehilangan legitimasi bahkan sebelum kritik itu disampaikan.

Yang lebih penting, rasa takut dalam kutipan ini telah bergerak dari ancaman eksternal menjadi mekanisme pengendalian internal. Para aktivis tidak perlu terus-menerus melihat aparat untuk merasa terancam; pengalaman penangkapan yang masih "menggelayuti" Yogyakarta sudah cukup untuk memengaruhi perilaku mereka. Dengan demikian, represi menghasilkan efek politik yang lebih luas daripada tindakan penangkapan itu sendiri karena ia mendorong masyarakat untuk membatasi dirinya sendiri.

Analisis Mitos

Pada tingkat mitos, kutipan tersebut menormalisasi anggapan bahwa bacaan tertentu memang layak dicurigai demi menjaga keamanan negara. Buku kemudian diperlakukan seperti ancaman fisik, sementara orang yang membawanya ditempatkan dalam posisi yang harus membuktikan bahwa dirinya bukan musuh negara.

Dalam perspektif Barthes, naturalisasi tersebut membuat hubungan antara pengetahuan dan ancaman politik tampak seolah-olah alamiah. Padahal, makna "berbahaya" yang dilekatkan pada buku merupakan hasil konstruksi kekuasaan. Ketika konstruksi itu diterima masyarakat, pengawasan terhadap bacaan alternatif memperoleh legitimasi sosial dan tidak lagi membutuhkan paksaan secara terus-menerus.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrol terhadap buku merupakan bagian dari kontrol terhadap kemungkinan lahirnya oposisi. Negara tidak hanya membatasi apa yang boleh dilakukan, tetapi juga berusaha mempersempit sumber pengetahuan yang dapat melahirkan cara pandang berbeda. Di sini, pembatasan pluralisme bekerja pada tingkat yang lebih mendasar: sebelum masyarakat membentuk organisasi atau gerakan, gagasan yang dapat menjadi dasar pembentukan gerakan tersebut telah lebih dahulu dicurigai.

Temuan ini kembali memperkuat konsep limited political pluralism dari Linz. Pembatasan pluralisme dalam rezim otoriter tidak selalu hadir dalam bentuk pelarangan total terhadap seluruh aktivitas politik. Ia dapat bekerja melalui pengawasan, stigma, dan rasa takut yang membuat gagasan alternatif sulit berkembang menjadi kesadaran politik bersama. Karena itu, kutipan tersebut memperlihatkan bahwa ruang pluralisme dapat dipersempit bahkan sebelum perbedaan pandangan berubah menjadi tindakan politik.

Jika kutipan pertama menunjukkan bahwa ketakutan muncul melalui pengalaman aktivis yang dipenjara karena berdiskusi, kutipan kedua memperlihatkan bagaimana pengalaman tersebut kemudian membentuk perilaku sehari-hari: membawa sebuah buku saja sudah dianggap berisiko. Kedua kutipan tersebut memperlihatkan satu pola yang sama, yaitu negara tidak hanya membatasi oposisi setelah ia terbentuk, tetapi juga mempersempit ruang tempat gagasan kritis dapat tumbuh. Inilah bentuk pembatasan pluralisme yang paling kuat dalam representasi novel: kekuasaan membuat masyarakat belajar untuk menghindari ruang politik yang dianggap berbahaya bahkan sebelum negara perlu bertindak secara langsung.

4.2.2. Tidak Ada Ideologi Elaboratif: Mentalitas Dominan (No Elaborate Guiding Ideology)

Indikator kedua kepemimpinan otoriter menurut Juan J. Linz adalah tidak adanya ideologi elaboratif (*no elaborate guiding ideology*). Berbeda dengan rezim totaliter yang mempertahankan kekuasaan melalui ideologi yang sistematis dan menyeluruh, rezim otoriter lebih mengandalkan mentalitas dominan yang dibangun melalui slogan, doktrin, propaganda, serta narasi tertentu untuk memperoleh kepatuhan masyarakat. Mentalitas tersebut tidak bertujuan membentuk keyakinan ideologis yang utuh, melainkan menciptakan persepsi bahwa tindakan negara selalu benar dan segala bentuk perbedaan merupakan ancaman terhadap stabilitas politik. Dalam novel *Laut Bercerita*, karakteristik tersebut direpresentasikan melalui berbagai pengalaman tokoh yang menunjukkan bagaimana negara membangun rasa takut, stigma, dan kecurigaan terhadap individu yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Salah satu representasi tersebut tampak dalam kutipan berikut.

Seperti saat kami mengundang Pak Razak untuk berkisah tentang pengalamannya di Pulau Buru selama belasan tahun dan kembali ke Jakarta untuk tetap dianggap sebagai musuh negara; tentang istri, anak-anak, dan kakak adiknya yang masih saja kesulitan mencari nafkah dan mengubah nama agar tak terlalu kentara bahwa mereka ada hubungannya dengan seorang bekas tahanan politik dari Pulau Buru. Dengan segala kesulitan hidup itu, Pak Razak menyatakan, "Masih berharap suatu hari nanti, entah kapan, keadilan akan tiba." Demikian dia menutup pengantar diskusinya (Chudori, 2017: 47)

Analisis Denotasi

Pada tataran denotasi, kutipan tersebut menceritakan pengalaman Pak Razak yang pernah menjadi tahanan politik di Pulau Buru. Setelah bebas dan kembali ke Jakarta, ia masih dipandang sebagai musuh negara. Tidak hanya dirinya, keluarganya juga mengalami berbagai kesulitan, seperti sulit memperoleh pekerjaan dan harus mengubah nama keluarga agar tidak diketahui memiliki hubungan dengan mantan tahanan politik. Meskipun mengalami berbagai bentuk diskriminasi, Pak Razak tetap menyimpan harapan bahwa suatu saat keadilan akan hadir.

Analisis Konotasi

Pada tingkat konotasi, frasa "tetap dianggap sebagai musuh negara" menunjukkan bahwa kekuasaan tidak berhenti menghukum seseorang pada saat ia menjalani hukuman. Status politik masa lalu justru diubah menjadi identitas sosial yang terus melekat. Di sini, stigma berfungsi sebagai perpanjangan represi:

seseorang dapat telah keluar dari penjara, tetapi belum benar-benar keluar dari posisi sebagai objek kecurigaan negara dan masyarakat.

Kesulitan memperoleh pekerjaan dan keharusan mengubah nama keluarga memperlihatkan bahwa stigma tersebut bergerak melampaui individu. Represi meluas kepada keluarga dan memengaruhi kesempatan mereka untuk menjalani kehidupan sosial secara normal. Negara, dengan demikian, tidak harus terus-menerus hadir melalui aparat; cukup dengan membiarkan stigma bekerja dalam hubungan sosial, masyarakat dapat ikut menjaga jarak dari kelompok yang telah diberi label sebagai ancaman.

Pernyataan Pak Razak tentang harapan akan datangnya keadilan menjadi kontras yang penting. Setelah menjalani hukuman, ia masih harus menunggu pengakuan atas ketidakadilan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya hilangnya kebebasan pada masa lalu, tetapi ketidakmampuan sistem politik untuk memulihkan hak dan martabat korban setelah represi berlangsung.

Analisis Mitos

Pada tingkat mitos, kutipan tersebut membangun keyakinan bahwa seseorang yang pernah dikaitkan dengan musuh negara akan tetap layak dicurigai meskipun tidak lagi melakukan aktivitas politik. Mitos ini membuat diskriminasi tampak sebagai tindakan kewaspadaan yang wajar, bukan sebagai akibat dari stigma politik yang sengaja dipelihara.

Dalam perspektif Roland Barthes, naturalisasi ini penting karena kekuasaan tidak perlu lagi memberikan perintah secara langsung. Stigma yang telah diterima masyarakat dapat bekerja secara otomatis melalui hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan keluarga. Dengan demikian, mentalitas dominan tidak hanya berada dalam narasi resmi negara, tetapi hidup dalam perilaku masyarakat sehari-hari.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuasaan dalam kutipan ini bekerja melalui pembentukan mentalitas, bukan melalui ideologi yang harus diterima masyarakat secara utuh. Negara membentuk kategori sosial mengenai siapa yang dianggap aman dan siapa yang harus dicurigai. Setelah kategori tersebut mengakar, masyarakat ikut mereproduksi batas politik tersebut melalui pengucilan dan diskriminasi.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep *no elaborate guiding ideology* dari Juan J. Linz. Rezim otoriter tidak harus memiliki ideologi yang sangat terperinci untuk mempertahankan kepatuhan. Mentalitas dominan berupa rasa takut, kecurigaan, dan stigma sudah cukup untuk membatasi perilaku politik masyarakat. Dalam novel, stigma terhadap Pak Razak dan keluarganya menunjukkan bahwa kekuasaan dapat bertahan melalui persepsi sosial yang terus direproduksi, bahkan ketika aparat tidak sedang melakukan tindakan represif secara langsung.

Dengan demikian, kekuatan politik yang ditampilkan dalam kutipan ini terletak pada kemampuan negara meninggalkan jejak ketakutan dalam kehidupan sosial. Represi menjadi efektif bukan hanya ketika seseorang ditangkap, tetapi ketika pengalaman

tersebut membuat orang lain belajar bahwa keterkaitan dengan kelompok kritis dapat membawa konsekuensi jangka panjang.

Representasi lain mengenai tidak adanya ideologi elaboratif dalam novel *Laut Bercerita* tampak melalui pengalaman Bram yang mengalami interogasi akibat aktivitas diskusi yang dilakukannya bersama teman-temannya.

Belakangan Bram tahu ada salah satu kawannya, anggota OSIS bernama Lusiana Antarini, mengadakan kegiatan diskusi Bram dan kawan-kawannya kepada ayahnya yang berhubungan dekat dengan kalangan intel. Bram dan kawan-kawannya diinterogasi berjam-jam di sebuah kantor (yang belakangan dia ketahui adalah sebuah kantor badan koordinasi intelijen). "Mereka menanyakan buku-buku yang aku baca dan aku menjawab bahwa sebagian besar buku itu milik perpustakaan," kata Bram tersenyum. (Chudori, 2017: 29)

Analisis Denotasi

Pada tataran denotasi, kutipan tersebut menceritakan bahwa kegiatan diskusi yang dilakukan Bram dan teman-temannya dilaporkan oleh salah seorang anggota OSIS kepada ayahnya yang memiliki hubungan dengan aparat intelijen. Akibat laporan tersebut, Bram beserta rekan-rekannya dipanggil dan menjalani interogasi selama berjam-jam di kantor badan koordinasi intelijen. Dalam proses interogasi, aparat menanyakan buku-buku yang dibaca oleh Bram sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap aktivitas diskusi yang mereka lakukan.

Analisis Konotasi

Pada tingkat konotasi, tindakan pelaporan oleh orang yang berada di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa pengawasan negara telah merembes ke dalam relasi sosial. Aktivitas yang semestinya dibicarakan secara terbuka justru dapat berubah menjadi informasi yang disampaikan kepada jaringan intelijen. Akibatnya, kepercayaan antarsesama menjadi rapuh karena setiap individu berpotensi menjadi pengamat sekaligus yang diawasi.

Interogasi terhadap buku-buku yang dibaca Bram memperlihatkan bahwa negara sedang mencari bukan hanya apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga dari mana seseorang memperoleh gagasan. Buku diperlakukan sebagai petunjuk mengenai orientasi politik pembacanya. Di titik ini, pengawasan terhadap pengetahuan berubah menjadi pengawasan terhadap kemungkinan lahirnya kritik: negara berusaha mengenali dan mengendalikan sumber pembentukan kesadaran politik sebelum gagasan tersebut berkembang menjadi tindakan.

Jawaban Bram bahwa sebagian besar buku berasal dari perpustakaan justru menegaskan betapa normalnya aktivitas membaca itu sendiri. Namun, dalam situasi yang digambarkan novel, sesuatu yang normal tersebut telah berubah menjadi sesuatu yang harus dijelaskan di hadapan aparat. Perubahan inilah yang memperlihatkan kedalaman kontrol otoriter: batas antara kegiatan akademik dan aktivitas politik sengaja dibuat kabur agar ruang pengawasan negara menjadi semakin luas.

Analisis Mitos

Pada tingkat mitos, kutipan tersebut membangun anggapan bahwa menjaga keamanan berarti ikut mengawasi aktivitas orang lain. Pelaporan terhadap kegiatan diskusi kemudian dapat dipahami sebagai tindakan yang wajar, sementara aktivitas intelektual tertentu ditempatkan sebagai sesuatu yang patut dicurigai.

Dalam perspektif Barthes, mitos bekerja ketika praktik pengawasan kehilangan kesan sebagai tindakan politik dan berubah menjadi kebiasaan sosial. Ketika masyarakat menerima bahwa membaca, berdiskusi, atau bertukar gagasan perlu diawasi, negara memperoleh bentuk kontrol yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada aparat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mentalitas dominan dalam kutipan ini dibangun melalui kombinasi rasa takut dan kebiasaan saling mengawasi. Negara tidak perlu terus-menerus memobilisasi aparat untuk mengontrol setiap percakapan karena sebagian fungsi pengawasan telah dipindahkan ke dalam hubungan sosial masyarakat itu sendiri.

Temuan tersebut memperkuat konsep *no elaborate guiding ideology* dari Linz. Yang dipertahankan oleh rezim bukanlah satu sistem pemikiran yang harus dipahami secara lengkap oleh masyarakat, melainkan seperangkat persepsi sederhana namun efektif: kritik berbahaya, bacaan tertentu mencurigakan, dan melapor kepada aparat dapat dianggap sebagai tindakan yang benar. Mentalitas semacam inilah yang membuat kontrol politik dapat bertahan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kutipan Pak Razak menunjukkan bagaimana stigma dipertahankan setelah seseorang keluar dari tahanan, kutipan Bram menunjukkan bagaimana stigma dan

kecurigaan diproduksi sejak seseorang masih berada dalam lingkungan pendidikan. Kedua kutipan tersebut memperlihatkan kesinambungan mekanisme kekuasaan: negara membentuk kategori tentang siapa yang harus dicurigai, lalu kategori tersebut direproduksi dalam kehidupan sosial. Karena itu, tidak adanya ideologi elaboratif dalam rezim otoriter bukan berarti negara tidak memiliki gagasan pembenaran, melainkan bahwa pembenaran tersebut bekerja melalui mentalitas dominan yang sederhana, berulang, dan mudah ditanamkan.

4.2.3. Tidak Ada Mobilisasi Politik yang Ekstensif (No Extensive Political Mobilization)

Indikator ketiga kepemimpinan otoriter menurut Linz adalah tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif. Rezim otoriter tidak memobilisasi rakyat secara aktif dan masif untuk mendukung tujuan politik negara sebagaimana dilakukan rezim totaliter. Sebaliknya, rezim otoriter mengondisikan masyarakat agar tidak aktif secara politik dengan menciptakan ketakutan, keterbatasan sumber daya, dan lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuhnya gerakan kolektif. Dalam novel *Laut Bercerita*, indikator ini tampak melalui gambaran keterbatasan yang dihadapi gerakan mahasiswa dalam membangun kekuatan kolektif, serta cara negara menggunakan pengawasan dan ancaman untuk memastikan bahwa mobilisasi yang ada tetap berskala kecil dan terisolasi.

Salah satu karakteristik paling fundamental dari rezim otoriter adalah penjinakan masyarakat melalui strategi depolitisasi. Rezim secara aktif membatasi, mencegah, atau melarang adanya mobilisasi politik kolektif yang datang dari inisiatif akar rumput. Dampak dari penutupan ruang mobilisasi massa yang ekstensif ini terekam dalam

keterbatasan taktis dan finansial kelompok mahasiswa saat mencoba membela hak komunal masyarakat adat:

Lahan pertanian jagung rakyat Desa Blangguan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan tentara dengan menggunakan mortar dan senapan panjang. Lahan pertanian mereka digusur bulldoser. Sang penyair dan aku sama-sama mengusulkan agar mahasiswa dan aktivis melawan tentara dengan aksi tanam jagung. Kami tak punya senapan dengan bayonet; kami tak punya otot, tak punya uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi, dan sumbangan beberapa individu yang secara diam-diam sudah muak dengan pemerintah Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun. (Chudori, 2017: 116)

Analisis Denotasi

Pada tataran denotasi, kutipan tersebut menceritakan pengusuran lahan pertanian milik masyarakat Desa Blangguan oleh aparat negara. Pengusuran dilakukan karena wilayah tersebut akan digunakan sebagai lokasi latihan gabungan militer. Menyikapi kondisi tersebut, tokoh Laut bersama rekan-rekannya mengusulkan aksi tanam jagung sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Aksi tersebut dilakukan secara damai dengan memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki, tanpa menggunakan kekerasan maupun persenjataan. Mereka hanya mengandalkan semangat,

dana pribadi, dan bantuan dari beberapa individu yang tidak lagi mendukung kebijakan represif pemerintah Orde Baru.

Analisis Konotasi

Pada tingkat konotasi, penggusuran lahan tidak hanya menunjukkan pengambilalihan ruang hidup masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara menempatkan kepentingan militer di atas kepentingan warga. Bulldoser menjadi simbol kemampuan negara untuk mengubah keputusan politik menjadi kenyataan material di lapangan, sementara masyarakat tidak memiliki kekuatan institusional yang sebanding untuk menolaknya.

Aksi tanam jagung justru memperlihatkan bentuk mobilisasi yang lahir dari keterbatasan tersebut. Para aktivis memilih simbol kehidupan dan pangan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan militer. Namun, pilihan aksi yang damai sekaligus menunjukkan bahwa ruang gerak mereka sangat sempit: mereka dapat menyatakan keberatan, tetapi tidak memiliki akses terhadap sumber daya politik yang memungkinkan tuntutan itu mengubah keputusan negara secara langsung.

Pernyataan "kami tak punya senapan dengan bayonet; kami tak punya otot, tak punya uang" memperlihatkan ketimpangan yang menjadi inti persoalan. Negara memiliki aparat, senjata, sumber daya, dan kewenangan administratif, sedangkan gerakan mahasiswa hanya mengandalkan solidaritas dan sumber daya pribadi. Dengan demikian, keterbatasan mobilisasi bukan semata-mata

disebabkan oleh lemahnya kemauan masyarakat, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang membuat sumber daya politik berada jauh lebih besar di tangan negara.

Analisis Mitos

Pada tingkat mitos, kepentingan negara dibangun sebagai kepentingan yang secara otomatis lebih tinggi daripada kepentingan masyarakat. Ketika penggusuran dilakukan atas nama latihan militer dan keamanan, kerugian warga dapat dipersepsikan sebagai pengorbanan yang wajar. Dalam kerangka ini, keberatan masyarakat mudah dipindahkan maknanya dari tuntutan hak menjadi gangguan terhadap kepentingan negara.

Dalam perspektif Barthes, naturalisasi tersebut membuat ketimpangan kekuasaan tampak sebagai sesuatu yang normal. Negara tampil sebagai pihak yang berhak menentukan penggunaan ruang, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri. Akibatnya, tindakan mempertahankan hak sendiri dapat dikonstruksikan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketertiban.

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kutipan ini bukan tidak adanya mobilisasi politik sama sekali, melainkan ketidakmampuan mobilisasi tersebut berkembang menjadi kekuatan kolektif yang luas. Aktivis masih bergerak, tetapi gerakannya berlangsung dalam kondisi sumber daya yang terbatas dan di bawah bayang-bayang kekuasaan negara. Dengan demikian, rezim tidak perlu menghapus seluruh bentuk perlawanan; cukup dengan memastikan bahwa perlawanan tidak memiliki ruang dan sumber daya untuk berkembang menjadi gerakan massal.

Temuan tersebut memperlihatkan karakter no extensive political mobilization sebagaimana dijelaskan Linz. Rezim otoriter cenderung membatasi mobilisasi agar masyarakat tidak berkembang menjadi kekuatan kolektif yang dapat mengganggu stabilitas kekuasaan. Aksi tanam jagung memperlihatkan bahwa mobilisasi masih mungkin dilakukan, tetapi dalam skala, sumber daya, dan ruang gerak yang terbatas. Keterbatasan tersebut justru menjadi bagian dari mekanisme politik yang membuat oposisi sulit berkembang secara luas.

Dengan demikian, kutipan ini menunjukkan bahwa depolitisasi tidak selalu berarti masyarakat sepenuhnya pasif. Masyarakat dapat tetap melawan, tetapi struktur kekuasaan membuat perlawanan itu harus berlangsung dengan cara yang terbatas, simbolik, dan penuh risiko. Dalam konteks inilah kekuasaan otoriter bekerja: bukan dengan menghilangkan seluruh keberanian untuk bergerak, melainkan dengan membatasi kemampuan gerakan tersebut untuk menjadi kekuatan politik yang besar.

Representasi tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif dalam novel *Laut Bercerita* juga terlihat melalui kondisi para aktivis yang harus hidup dalam pelarian akibat tekanan negara terhadap kelompok yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Kondisi tersebut tergambar dalam kutipan berikut:

*Apakah kita akan pernah hidup dalam Indonesia yang demikian?
Indonesia yang tak perlu membuat para aktivis dan mahasiswa yang kritis harus
hidup dalam buruan dan sesekali mendapat bantuan dari berbagai orang baik,
termasuk Utara Bayu . (Chudori, 2017: 211)*

Analisis Denotasi

Pada tataran denotasi, kutipan tersebut menggambarkan harapan tokoh terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik, yaitu kondisi ketika para aktivis dan mahasiswa tidak lagi harus hidup sebagai buronan akibat menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kutipan ini juga menjelaskan bahwa selama menjadi buronan, para aktivis hanya dapat bertahan hidup melalui bantuan dari orang-orang yang secara sukarela memberikan perlindungan dan bantuan, salah satunya Utara Bayu. Situasi tersebut menunjukkan bahwa para aktivis tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitasnya secara terbuka karena terus berada dalam ancaman penangkapan.

Analisis Konotasi

Pada tingkat konotasi, frasa "hidup dalam buruan" menunjukkan bahwa represi telah mengeluarkan aktivis dari ruang politik terbuka. Mereka tidak hanya kehilangan keamanan fisik, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menjalankan aktivitas politik secara normal. Menjadi buronan berarti kehidupan sehari-hari sendiri telah berubah menjadi ruang pengawasan dan pelarian.

Sementara itu, bantuan dari "berbagai orang baik" menunjukkan bahwa solidaritas masih ada, tetapi harus bergerak secara tersembunyi. Dukungan sosial yang seharusnya dapat berkembang menjadi partisipasi politik terbuka justru berubah menjadi jaringan perlindungan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana represi mengubah mobilisasi dari gerakan publik menjadi hubungan bertahan hidup yang bersifat terbatas.

Pertanyaan tentang apakah Indonesia akan pernah menjadi negara yang tidak memburu aktivis dan mahasiswa kritis merupakan kritik terhadap kondisi politik yang telah membalik hubungan antara negara dan warga. Dalam situasi demokratis, kritik seharusnya menjadi bagian dari mekanisme koreksi terhadap pemerintah. Dalam kutipan ini, kritik justru menjadi alasan seseorang harus bersembunyi. Kontras tersebut memperlihatkan betapa sempitnya ruang mobilisasi politik yang tersedia.

Analisis Mitos

Pada tingkat mitos, pengejaran terhadap aktivis dinaturalisasi sebagai konsekuensi yang dapat diterima ketika seseorang dianggap mengganggu stabilitas. Negara kemudian tampil sebagai penjaga ketertiban, sedangkan aktivis kritis ditempatkan sebagai sumber gangguan. Dengan cara ini, tindakan terhadap oposisi memperoleh pembenaran melalui bahasa keamanan.

Dalam perspektif Barthes, mitos tersebut bekerja dengan membalik posisi korban dan ancaman. Aktivis yang kehilangan kebebasan justru diposisikan sebagai pihak yang membahayakan negara, sementara tindakan negara terhadap mereka dipersepsikan sebagai upaya menjaga ketertiban. Pembalikan makna ini membuat represi lebih mudah diterima dan sekaligus mempersempit kemungkinan munculnya dukungan publik terhadap gerakan oposisi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa negara tidak hanya membatasi mobilisasi melalui penangkapan, tetapi juga melalui penciptaan kondisi yang membuat gerakan politik kehilangan ruang terbuka. Aktivis yang harus hidup sebagai buronan tidak mungkin mengorganisasi gerakan secara luas. Akibatnya, mobilisasi bertahan melalui

jaringan kecil dan bantuan personal, bukan melalui partisipasi politik masyarakat secara terbuka.

Temuan tersebut kembali memperkuat konsep no extensive political mobilization dari Linz. Ancaman terhadap aktivis menghasilkan efek yang melampaui individu yang ditangkap: masyarakat lain belajar bahwa keterlibatan politik dapat membawa konsekuensi serius. Dengan demikian, rasa takut menjadi mekanisme depolitisasi karena mengurangi kemungkinan orang lain untuk bergabung, bersuara, dan membangun gerakan kolektif.

Jika kutipan Blangguan menunjukkan bagaimana keterbatasan sumber daya dan dominasi instrumen negara membuat mobilisasi sulit berkembang, kutipan kedua memperlihatkan akibat lanjutannya: aktivis bahkan harus meninggalkan ruang publik dan hidup dalam pelarian. Kedua kutipan tersebut memperlihatkan bahwa mobilisasi politik memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi sengaja dibuat tetap kecil, terfragmentasi, dan tidak mampu berkembang menjadi kekuatan kolektif yang luas.

4.2.4. Kepemimpinan tanpa Akuntabilitas yang Luas (Leadership Without Extensive Accountability)

Indikator keempat kepemimpinan otoriter menurut Linz adalah kepemimpinan yang berkuasa tanpa batasan formal yang efektif. Tidak ada mekanisme akuntabilitas yang sungguh-sungguh, baik dari lembaga legislatif, yudikatif, maupun masyarakat sipil. Kekuasaan dieksekusi melalui aparat keamanan, jaringan loyalis, dan tindakan sewenang-wenang yang tidak dapat digugat secara hukum. Dalam novel Laut Bercerita, indikator ini terepresentasikan secara paling nyata melalui penggambaran penyiksaan dalam

tahanan, interogasi tanpa prosedur hukum yang jelas, dan penggunaan kekerasan negara terhadap warga sipil tanpa pertanggungjawaban apapun kepada publik.

Puncak persoalan akuntabilitas terlihat ketika fasilitas yang seharusnya menjadi bagian dari infrastruktur negara justru digunakan untuk menyiksa orang yang dianggap mengancam kedudukan presiden. Kutipan berikut memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat mengubah institusi dan fasilitas publik menjadi instrumen represif:

Aku baru menyadari rupanya di setiap sel disediakan bak mandi. Apakah arsitek yang mendesain kerangkeng bawah tanah ini tahu bahwa karyanya akan digunakan untuk menyiksa orang? Menyiksa kami, orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukan presiden? (Chudori, 2017:146)

Analisis Denotasi

Pada tataran denotasi, kutipan tersebut menggambarkan kondisi yang dialami tokoh Laut ketika berada di ruang tahanan bawah tanah. Ia menyadari bahwa setiap sel dilengkapi dengan bak mandi yang ternyata digunakan sebagai sarana penyiksaan terhadap para tahanan. Tokoh Laut kemudian mempertanyakan apakah pihak yang merancang bangunan tersebut mengetahui bahwa fasilitas yang dibuat akan dimanfaatkan sebagai alat penyiksaan. Ia juga menyadari bahwa dirinya bersama tahanan lainnya disiksa karena dianggap sebagai kelompok yang membahayakan kedudukan presiden.

Analisis Konotasi

Pada tingkat konotasi, bak mandi tidak lagi dimaknai sebagai fasilitas yang berkaitan dengan kebersihan atau kebutuhan dasar manusia, tetapi berubah menjadi simbol kekerasan yang dilembagakan oleh negara. Perubahan makna tersebut menunjukkan bahwa ruang tahanan tidak lagi berfungsi sebagai tempat penegakan hukum, melainkan sebagai ruang yang digunakan untuk mengintimidasi dan menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaan.

Sementara itu, frasa "kerangkeng bawah tanah" mengandung makna simbolik mengenai praktik kekuasaan yang dijalankan secara tersembunyi dan jauh dari pengawasan publik. Lokasi tersebut menggambarkan adanya tindakan negara yang dilakukan di luar pengetahuan masyarakat sehingga penyiksaan terhadap tahanan dapat berlangsung tanpa adanya kontrol maupun pertanggungjawaban.

Frasa "orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukan presiden" menunjukkan bahwa status seseorang sebagai ancaman tidak ditentukan melalui proses hukum yang terbuka dan adil, tetapi berdasarkan penilaian sepihak dari penguasa. Penggunaan kata "dianggap" mengisyaratkan bahwa tuduhan terhadap para aktivis belum tentu didasarkan pada bukti yang sah, melainkan pada persepsi politik yang dibangun oleh negara untuk membenarkan tindakan represif terhadap kelompok kritis.

Analisis Mitos

Pada tingkat mitos, kutipan tersebut membangun keyakinan bahwa penyiksaan terhadap individu yang dianggap mengancam negara merupakan tindakan yang dapat dibenarkan demi menjaga kekuasaan dan stabilitas politik. Negara membentuk anggapan bahwa siapa pun yang dipersepsikan membahayakan presiden layak diperlakukan di luar mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekerasan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi sebagai instrumen yang sah untuk mempertahankan ketertiban negara.

Dalam perspektif semiotika Roland Barthes, mitos tersebut merupakan bentuk naturalisasi ideologi kekuasaan. Praktik penyiksaan dikonstruksikan sebagai sesuatu yang wajar dalam menghadapi pihak-pihak yang dianggap mengganggu negara. Akibatnya, tindakan represif yang dilakukan aparat kehilangan sifatnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan justru dipersepsikan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional. Mitos tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui pembentukan makna yang membuat tindakan tidak manusiawi tampak dapat diterima.

Hasil analisis semiotik menunjukkan bahwa kutipan tersebut merepresentasikan praktik kekuasaan yang dijalankan tanpa adanya mekanisme akuntabilitas kepada masyarakat. Penyiksaan terhadap para tahanan berlangsung di ruang tertutup, tanpa proses hukum yang transparan, serta tanpa adanya kesempatan bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aparat negara

memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai ancaman serta bagaimana mereka diperlakukan. Ketiadaan mekanisme pengawasan membuat penggunaan kekuasaan berlangsung secara sewenang-wenang dan sulit dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *leadership without extensive accountability* yang dikemukakan oleh Juan J. Linz. Linz menjelaskan bahwa dalam rezim otoriter, pemimpin menjalankan kekuasaan dengan tingkat akuntabilitas yang sangat rendah. Keputusan-keputusan politik maupun tindakan aparat negara tidak tunduk pada mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari lembaga perwakilan, lembaga peradilan, maupun masyarakat. Dalam novel *Laut Bercerita*, penyiksaan terhadap para aktivis menunjukkan bahwa negara menggunakan kewenangannya secara represif tanpa memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan atau mengajukan keberatan terhadap tindakan yang diterimanya. Dengan demikian, kekuasaan dijalankan berdasarkan kepentingan mempertahankan rezim, bukan berdasarkan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Representasi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Pada periode tersebut, aparat keamanan memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menangani individu maupun kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Berbagai kasus penangkapan, penahanan tanpa proses hukum yang jelas, penyiksaan, hingga penghilangan paksa terhadap aktivis menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan

negara. Kondisi tersebut menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sementara aparat yang melakukan pelanggaran jarang dimintai pertanggungjawaban. Melalui penggambaran ruang tahanan bawah tanah dan praktik penyiksaan terhadap para aktivis, novel *Laut Bercerita* merepresentasikan karakteristik kepemimpinan otoriter yang dijalankan tanpa akuntabilitas yang luas sebagaimana dijelaskan oleh Juan J. Linz.

Dengan demikian, persoalan akuntabilitas dalam kutipan ini terletak pada ketimpangan mendasar antara kemampuan negara untuk bertindak dan kemampuan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban. Negara memiliki aparat, ruang tahanan, dan kewenangan untuk menentukan nasib seseorang, sementara korban hampir tidak memiliki saluran untuk menolak tindakan tersebut.

4.3. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis semiotika Roland Barthes terhadap novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori, ditemukan bahwa novel tersebut merepresentasikan kepemimpinan negara yang cenderung bersifat otoriter. Representasi tersebut ditunjukkan melalui berbagai peristiwa, dialog, dan pengalaman tokoh yang menggambarkan hubungan antara negara dan masyarakat pada masa Orde Baru. Temuan penelitian ini dianalisis menggunakan teori rezim otoriter Juan J. Linz yang meliputi empat karakteristik utama, yaitu pluralisme politik yang terbatas, tidak adanya ideologi elaboratif, tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif, serta kepemimpinan yang tidak memiliki akuntabilitas politik yang luas.

Karakteristik pertama yang ditemukan adalah pluralisme politik yang terbatas. Dalam novel *Laut Bercerita*, negara direpresentasikan sebagai aktor yang membatasi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul. Aktivitas diskusi buku, penyebaran bacaan alternatif, serta kegiatan intelektual mahasiswa diperlakukan sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Situasi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang yang luas bagi berkembangnya pandangan politik yang berbeda dari narasi resmi pemerintah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Linz yang menyatakan bahwa rezim otoriter membatasi keberadaan kelompok-kelompok politik dan sosial yang berpotensi menantang kekuasaan negara. Dengan demikian, pluralisme politik dalam novel direpresentasikan sebagai sesuatu yang dikendalikan dan diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Karakteristik kedua adalah tidak adanya ideologi elaboratif. Berdasarkan hasil analisis, novel memperlihatkan bahwa negara tidak mempertahankan kekuasaannya melalui penyebaran ideologi yang sistematis, melainkan melalui pembentukan mentalitas sosial berupa ketakutan, kecurigaan, dan stigma politik. Hal tersebut terlihat dari perlakuan terhadap mantan tahanan politik serta keluarganya yang tetap dianggap sebagai ancaman meskipun tidak lagi terlibat dalam aktivitas politik. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas membaca dan berdiskusi menunjukkan adanya upaya negara untuk mengontrol cara berpikir masyarakat. Temuan ini sesuai dengan pandangan Linz yang menjelaskan bahwa rezim otoriter lebih mengandalkan mentalitas tertentu daripada ideologi yang terstruktur untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks novel,

mentalitas tersebut diwujudkan melalui rasa takut dan kecurigaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Karakteristik ketiga adalah tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif. Novel *Laut Bercerita* menggambarkan bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa dan aktivis, menghadapi berbagai hambatan dalam membangun gerakan politik yang luas. Keterbatasan sumber daya, pengawasan aparat, serta ancaman penangkapan menyebabkan aktivitas politik hanya dapat dilakukan secara terbatas dan sering kali harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak mendorong partisipasi politik masyarakat secara aktif, melainkan berupaya mengendalikan dan membatasi ruang gerak kelompok yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Temuan ini memperkuat pandangan Linz bahwa rezim otoriter cenderung menghambat mobilisasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan.

Karakteristik terakhir adalah kepemimpinan yang tidak memiliki akuntabilitas politik yang luas. Dalam novel, karakteristik ini direpresentasikan melalui praktik penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pengawasan terhadap aktivis yang dilakukan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Negara digambarkan memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai ancaman politik dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap mereka. Sementara itu, pengalaman para korban penyiksaan menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak warga negara. Temuan ini sesuai dengan teori Linz yang menyatakan bahwa rezim otoriter memiliki batas kekuasaan yang tidak

jelas sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa maupun aparat negara.

Keempat karakteristik tersebut pada akhirnya membentuk satu pola yang saling menguatkan. Negara membatasi ruang munculnya gagasan kritis, membangun rasa takut dan stigma, mempersempit kemampuan masyarakat untuk bergerak secara kolektif, lalu menjalankan tindakan represif dalam ruang yang minim pengawasan. Karena itu, kepemimpinan otoriter dalam novel tidak hanya tampak dari kerasnya tindakan negara, tetapi dari kemampuannya menciptakan lingkungan politik yang membuat masyarakat sulit membentuk kekuatan tandingan.

Dengan demikian, *Laut Bercerita* dapat dibaca sebagai kritik politik terhadap cara kekuasaan mempertahankan dirinya bukan hanya melalui kekerasan terbuka, tetapi juga melalui mekanisme yang lebih halus: membuat masyarakat takut, saling curiga, membatasi ruang gagasan, dan kehilangan kemampuan untuk mengorganisasi perlawanan secara luas. Temuan tersebut menempatkan novel sebagai sumber untuk memahami bagaimana otoritarianisme bekerja dalam relasi negara dan masyarakat pada masa Orde Baru.

Cara negara menjalankan kekuasaan terhadap oposisi politik dalam novel *Laut Bercerita* digambarkan melalui berbagai praktik represif yang dilakukan terhadap individu maupun kelompok yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. Oposisi politik dalam novel tidak selalu muncul dalam bentuk organisasi formal, melainkan juga melalui aktivitas intelektual mahasiswa, diskusi buku, advokasi terhadap petani, serta

penyebaran gagasan kritis. Negara merespons aktivitas tersebut dengan pendekatan keamanan yang menempatkan kritik sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan dengan mengutamakan kontrol politik daripada membuka ruang dialog.²⁶

Salah satu cara negara menjalankan kekuasaan terhadap oposisi politik adalah melalui penggunaan aparat keamanan untuk melakukan penangkapan dan interogasi terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas kritis. Mahasiswa yang mengikuti diskusi, membaca buku tertentu, atau terlibat dalam advokasi sosial digambarkan menjadi sasaran pengawasan dan tindakan represif. Penangkapan dilakukan tanpa proses hukum yang transparan, sehingga oposisi politik tidak memiliki ruang perlindungan. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa negara menggunakan instrumen keamanan sebagai alat untuk membatasi perkembangan gerakan oposisi.²⁷

Selain penangkapan, negara juga menjalankan kekuasaan melalui praktik intimidasi yang menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat. Ancaman, pengawasan, dan penyebaran informasi mengenai tindakan represif terhadap aktivis lain membentuk kondisi psikologis yang menekan oposisi politik. Dalam situasi tersebut, individu yang memiliki pandangan kritis menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Rasa takut yang terbentuk bukan hanya akibat tindakan langsung, tetapi juga karena

²⁶ Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*.

²⁷ Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*.

persepsi bahwa negara memiliki kemampuan untuk mengontrol dan menghukum setiap bentuk perlawanan.

Cara lain yang ditampilkan dalam novel adalah penggunaan kekerasan sebagai instrumen untuk meredam oposisi. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikologis selama proses interogasi maupun penahanan. Aktivis yang ditangkap diperlakukan sebagai pihak yang membahayakan negara, sehingga legitimasi kekerasan dibangun melalui narasi keamanan nasional. Dengan demikian, negara menempatkan oposisi politik sebagai ancaman yang harus dilumpuhkan, bukan sebagai kelompok yang memiliki hak untuk berbeda pendapat.²⁸

Negara juga menjalankan kekuasaan melalui pembatasan ruang komunikasi oposisi. Diskusi mahasiswa, pertemuan kelompok, dan penyebaran informasi kritis dianggap sebagai aktivitas yang mencurigakan. Pembatasan ini membuat oposisi kesulitan membangun jaringan dan mengorganisasi gerakan. Akibatnya, oposisi menjadi terfragmentasi dan tidak memiliki kekuatan kolektif yang signifikan. Strategi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menekan individu, tetapi juga berupaya melemahkan solidaritas kelompok.

Selain itu, kontrol terhadap wilayah sosial juga menjadi bagian dari cara negara menghadapi oposisi politik. Kehadiran aparat di kampus, desa, dan ruang publik lainnya menciptakan situasi di mana masyarakat merasa diawasi. Kondisi ini menyebabkan

²⁸ Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*.

oposisi politik tidak dapat berkembang secara terbuka. Pengawasan yang ketat membuat aktivitas oposisi berpindah ke ruang-ruang yang lebih tertutup, yang pada akhirnya membatasi jangkauan pengaruhnya.²⁹

Negara juga menjalankan kekuasaan terhadap oposisi politik melalui strategi penyusupan ke dalam kelompok aktivis. Dalam novel *Laut Bercerita*, digambarkan bahwa individu yang berada dalam lingkaran pertemanan aktivis ternyata berperan sebagai informan yang memberikan informasi kepada aparat keamanan. Penyusupan ini menyebabkan aktivitas kelompok oposisi dapat dipantau secara rinci, termasuk rencana diskusi, pertemuan, serta jaringan yang terlibat. Akibatnya, negara dapat melakukan penangkapan secara terarah terhadap anggota kelompok yang dianggap paling aktif. Strategi ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui tindakan represif terbuka, tetapi juga melalui kontrol tersembunyi yang melemahkan solidaritas internal oposisi. Ketika kepercayaan antaranggota kelompok terganggu, oposisi menjadi lebih rentan dan mudah dilumpuhkan, bahkan berujung pada penangkapan dan penghilangan paksa terhadap aktivis.³⁰

Pola tersebut memperlihatkan bahwa represi dalam novel tidak selalu diterapkan secara merata. Sebagian aktivis menjadi sasaran penangkapan dan penghilangan paksa, sedangkan pihak lain dapat tetap berada dalam lingkungan sosial-politik yang relatif aman atau bahkan berfungsi sebagai sumber informasi bagi aparat. Di sinilah konsep

²⁹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*.

³⁰ Rasyid, "Otonomi Daerah dan Dalam Negara Kesatuan."

politik belah bambu menjadi relevan. Kekuasaan tidak harus menghadapi seluruh kelompok oposisi sebagai satu kesatuan; dengan membedakan siapa yang ditekan dan siapa yang dibiarkan atau dimanfaatkan, negara dapat memecah solidaritas kelompok sebelum kelompok tersebut berkembang menjadi kekuatan politik yang terkonsolidasi. Dengan demikian, politik belah bambu bekerja bukan sekadar melalui perbedaan perlakuan, tetapi melalui penghancuran kemampuan oposisi untuk melihat dirinya sebagai satu kekuatan bersama.

Secara keseluruhan, cara negara menjalankan kekuasaan terhadap oposisi dalam novel berlangsung melalui rangkaian mekanisme yang saling memperkuat: pengawasan untuk mengetahui, infiltrasi untuk memecah, intimidasi untuk menakut-nakuti, penangkapan dan kekerasan untuk melumpuhkan, serta pembatasan komunikasi untuk mencegah konsolidasi. Politik belah bambu memperlihatkan bagaimana represi tersebut dapat dibuat selektif sehingga negara tidak perlu menggunakan kekerasan terhadap semua pihak. Cukup dengan menekan kelompok yang paling kritis dan mengelola pihak lain agar tidak bersatu dengan mereka, kekuasaan dapat mempertahankan dominasi dengan biaya politik yang lebih kecil. Inilah yang membuat mekanisme kekuasaan dalam novel tidak hanya bersifat represif, tetapi juga strategis.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes dan teori rezim otoriter Juan J. Linz, dapat disimpulkan bahwa novel tersebut merepresentasikan kepemimpinan otoriter negara pada masa Orde Baru melalui berbagai bentuk pengendalian terhadap kehidupan politik masyarakat. Representasi tersebut ditunjukkan melalui empat karakteristik utama rezim otoriter, yaitu pluralisme politik yang terbatas, tidak adanya ideologi elaboratif, tidak adanya mobilisasi politik yang ekstensif, dan kepemimpinan tanpa akuntabilitas yang luas. Negara digambarkan membatasi ruang partisipasi politik, mengawasi aktivitas kelompok kritis, membangun mentalitas ketakutan dan kecurigaan di tengah masyarakat, serta menjalankan kekuasaan secara terpusat tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan negara dalam novel cenderung menempatkan stabilitas politik dan keberlangsungan kekuasaan sebagai prioritas utama dibandingkan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa cara negara menjalankan kekuasaannya terhadap kelompok oposisi politik dilakukan melalui berbagai mekanisme represif, seperti pengawasan, intimidasi, pembatasan akses informasi, infiltrasi terhadap kelompok aktivis, penangkapan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa. Represi tersebut tidak dijalankan secara merata terhadap seluruh kelompok kritis, melainkan

bersifat selektif melalui pola kooptasi sebagian pihak dan penekanan pihak lain sebagaimana dijelaskan melalui konsep politik belah bambu, sehingga solidaritas kolektif oposisi tidak pernah sempat terkonsolidasi menjadi kekuatan tunggal yang mengancam kekuasaan negara. Oposisi politik tidak diposisikan sebagai bagian yang sah dalam proses politik, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara yang harus dikendalikan. Melalui representasi tersebut, novel *Laut Bercerita* menunjukkan bahwa kekuasaan negara pada masa Orde Baru dijalankan melalui kombinasi kontrol politik, kekerasan negara, dan pembatasan kebebasan sipil untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Dengan demikian, novel ini tidak hanya menjadi karya sastra yang merekam pengalaman sejarah, tetapi juga menjadi kritik terhadap praktik kepemimpinan otoriter dan penggunaan kekuasaan negara yang represif terhadap masyarakat.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademis

Penelitian ini masih terbatas pada analisis representasi kepemimpinan otoriter negara dalam novel *Laut Bercerita* menggunakan teori rezim otoriter Juan J. Linz dan pendekatan semiotika Roland Barthes. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan teori atau perspektif ilmu politik lainnya, seperti teori kekuasaan, demokratisasi, hak asasi manusia, atau relasi negara dan masyarakat sipil sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik kekuasaan negara. Penelitian selanjutnya juga dapat mendalami konsep politik belah bambu secara lebih khusus, misalnya melalui kajian kooptasi dan patronase politik pada masa Orde Baru, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai

mekanisme kekuasaan yang bersifat selektif terhadap kelompok oposisi. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat melakukan studi komparatif dengan karya sastra lain yang mengangkat tema politik dan otoritarianisme agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai representasi kekuasaan dalam karya sastra Indonesia.

5.2.2. Saran Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan pembaca dalam memahami karakteristik kepemimpinan otoriter serta mekanisme negara dalam menjalankan kekuasaan terhadap kelompok oposisi politik pada masa Orde Baru. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran ilmu politik maupun kajian sastra yang berkaitan dengan hubungan antara karya sastra, kekuasaan negara, dan realitas sosial-politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Oleh, Suryadi Culla, and Orde Baru. "Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia,".
- Aspinall, Edward. "Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia," 2005.
- Bourchier, David. *Lliberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. Routledge, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*.
Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. equinox publishing, 2007.
- "The Army and Politics In Indonesia." Cornell University Press, 1978.
- Demokratisasi, dan Prospek. "Keretakan Otoritariansme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi" 2, no. 2 (1998).
- Freedom House, "Indonesia: Freedom in the World 2026 Country Report," Freedom House, 2026.
- Masa Reformasi," *Jurnal Politik Indonesia* 8, no. 1 (2022): 59–78.
- Eriyanto. *Analisis Wacana ; Pengantar Analisis Teks Media: Komunikasi*.
- Fairclough, Norman. *Analysing Discourse Textual Analysis for Social Research*.
- "Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language," 1995.
- Fatimah, Siti. "Demokrasi Digital dan Welfare," 1945, 855–86.
- Fauzan, Indra, and Nidzam Sulaiman. "Jurnal Administrasi Publik : Budaya Politik Sipil dan Pendemokrasian di Indonesia : Political Culture and Democratization in Indonesia : An Political Analysis" 9, no. 1 (2019): 57–67.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings*, 1977.
- Hadiz, vedi r. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford University Press, 2010.
- Ham, Catatan. "Catatan HAM 2012 dan Rekomendasi," no. 39 (2012).
- Hasanah, Uswatun, Chintia Kirani, Elina Mitha Gabylia, and Robiatul Adawiyah. "Etika Dan Budaya Politik " Konsep Sistem Politik Di Indonesia "" 1, no. 2 (2022): 11–12.

- Heryanto, Ariel. *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture*.
- State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*.
- Huntington, Samuel P. *Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*.
- Ifra, Rahma Suryani, and Etmi Hardi. "Otoritarianisme Orde Baru Dalam Karya Puisi Wiji Thukul" 8 (2025): 1252–59.
- Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," 2018, 49–68.
- Laut, Novel, and Bercerita Kajian. "Strategi Perlawanan Terhadap Dominasi Kekuasaan Negara Dalam Novel Laut Bercerita: Kajian Subaltern" 2, no. 9 (2025): 1–13.
- Leila, Karya, S Chudori dan, Sebagai Bahan, and Ajar di. "Postkolonialisme Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar di Sma," 2024.
- Leila, Karya, S Chudori Kajian, Max Weber, Karya Leila, S Chudori Kajian, and Max Weber. "Legitimasi Negara Atas Mahasiswa Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori: Kajian Max Weber," no. 1 (2017).
- "Lewin, Kurt, Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates. *Journal of Social Psychology*.
- Lijphart, Arend. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*.
- Linz, Juan J. *Totalitarian and Authoritarian Regimes*, 2000.
- Maggalatung, A Salman. "Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter," 1945, 1–12.
- Magnis-suseno, Franz. *Franz Magnis-Suseno. 2001, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*.
- Marijan, Prof. Dr. Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*.
- Noer, Deliar. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*.
- Nugroho, Dr. Riant. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik Manajemen Politik Kebijakan Publik Etika Kebijakan Publik*, 2023.
- Nursidik, Ihsan. "Tafsir Indonesia di Rezim Otoritarianisme" 1, no. Kamsi 2013 (2021): 198–203.

- Rafni, Al. "Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia," no. 1 (2002): 8–18.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*.
- Raharjo, Trisno. "Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia," .
- Rahmi, Yulina. "Representasi Kekerasan Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S . Chudori (Representation Of Violence In Laut Bercerita Novel By Leila S . Chudori)" 11, no. 2 (2021): 194–204.
- Rajab, Budi. "Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi dan Politik, dan Demokrasi Formal Masa Reformasi" 8, no. 1 (2002): 59–78.
- Rasyid, Ryaas. "Otonomi Daerah dan Dalam Negara Kesatuan," .
- Revisi, Edisi, and Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*, 2021.
- Richard Robison, Vedi R. Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge Curzon.
- Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*.
- Siahaan, Hotman M. *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*.
- Sosial, Jurnal Ilmu, and Ilmu Politik Volume. "Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik" 13, no. November (2009): 131–48.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta., 2019.
- Sukma, Rizal. "Islam in Indonesian Foreign Policy,".
- Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik,".
- Sutikno, R. B. *The Power of Empathy in Leadership (to Enhance Long-Term Company Performance)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Winters, Jeffrey A. "Indonesia The Rise Of Capital: A Review Essay," 1981.
- Yukl, Gary. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Edited by Budi Supriyanto. Jakarta: PT. Indeks, 2010.